S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/Permentan/RC.020/3/2016

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 perlu ditinjau kembali;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyusunan program pembangunan pertanian.

Pasal 3

Renstra Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dituangkan dalam Renja Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Renja Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Maret 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Para Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
5. Pemimpin Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
DAFTAR BOKS xx
DAFTAR SINGKATAN xxi

BAB I
PENDAHULUAN 5
A. Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2010-2014 6
1.Produk Domestik Bruto 6
2.Penyediaan Lapangan Kerja 7
3.Investasi Sektor Pertanian 7
4.Neraca Perdagangan Sektor Pertanian 8
5.Nilai Tukar Petani 10
6.Kesejahteraan Petani 11
B. Pendapatan Perkapita 12
1.Tingkat Kemiskinan 14
2.Kerawanan Pangan Rumah Tangga 14
C. Capaian Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2010-2014 15
1.Produksi Tanaman Pangan 15
2.Produksi Hortikultura 17
3.Produksi Perkebunan 19
4.Produksi Peternakan 22
D. Faktor Pendukung Pembangunan Pertanian 24
1.APBN Kementerian Pertanian 24
2.Pengembangan Kapasitas Institusi Kementerian Pertanian 25
3.Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis 27
4.Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam Pertanian 30
a. Sumberdaya Lahan dan Air 31
b. Pupuk, Alsintan dan Pembiayaan 35
c. Perbenihan 38
5.Pembangunan pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 43

B. Pembangunan Sistem Inovasi 46
C. Penyediaan Pangan Masyarakat 48
D. Perlindungan Produk Pertanian Melalui Perkarantinaan 52
E. Pertanian dalam Jasa Lingkungan 53
F. Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pertanian 55
1. Potensi 55
a. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem 55
b. Lahan Pertanian 56
c. Teknologi 57
d. Tenaga Kerja 58
e. Pasar 59
2. Permasalahan 61
a. Lahan 61
b. Beternak tidak mempunyai lahan 64
3. Infrastruktur 64
4. Sarana Produksi 65
5. Regulasi 68
6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 70
a. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat 70
b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi 71
c. Menurunnya Minat Generasi Muda 71
7. Permodalan 73
8. Tantangan Pembangunan Pertanian 2015-2019 74
1). Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi 74
2). Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian 80

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 82
A. Visi Kementerian Pertanian 82
B. Misi Kementerian Pertanian 82
C. Tujuan 83
D. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian 84

BAB III 86
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 86
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 89
1. Upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, dilaksanakan dengan strategi: 89
a. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 89
b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian..... 91
c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit..... 93
d. Penguatan kelembagaan petani 94
e. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 94
f. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 95
g. Penguatan jaringan pasar produk pertanian..... 96
h. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman..... 96
i. Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian 99
j. Perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian..... 101
k. Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi 101
2. Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, dilakukan melalui strategi: 102
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional..... 104
a. Pengembangan kawasan pertanian..... 104
b. Pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal 106
d. Fokus komoditas strategis..... 107
e. Pengarusutamaan gender..... 108
f. Kerjasama bilateral, regional dan internasional 108
4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian
a. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian 109
b. Meningkatkan dukungan perkarantinaan 109
c. Mengelola regulasi 110
d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 110
e. Mengelola perencanaan yang efisien 111
f. Mengelola sistem pengawasan 111
g. Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati..... 111
g. Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi 112

B. Langkah Operasional 112
1. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 112
a. Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar 113
b. Dukungan Pasca Panen, pengolahan dan Pemasaran 113
2. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Tebu 114
a. Pemantapan Areal Tebu 114
b. Penguatan di sektor hilir pergulaan 115
3. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Daging 116
a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak 116
b. Pengembangan pakan ternak 116
c. Kesehatan hewan 116
d. Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha Peternakan 117
4. Langkah Operasional Peningkatan Distribusi Pangan 117
5. Langkah Operasional Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Pangan 117
6. Langkah Operasional Peningkatan Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal 118
7. Langkah Operasional Stabilisasi Produksi Cabai dan Bawang Merah 118
8. Langkah Operasional Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Pertanian 119
9. Langkah Operasional Penyediaan dan Peningkatan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi 122
10. Langkah Operasional Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani 123
11. Langkah Operasional Peningkatan Kualitas Petani dan Kelembagaannya 124
12. Langkah Operasional Peningkatan Kualitas Aparatur dan layanan Kelembagaan 125
13. Langkah Operasional Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 126
C. Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian 126
D. Kerangka Regulasi 128
E. Kerangka Kelembagaan 130
1. Target Makro 132
a. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian 133
b. Pendapatan Perkapita 134
2. Target Kinerja 135

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJPN yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan RPJMN 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025, memproritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan.

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada RPJMN 2015-2019, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

(1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Selain Kedaulatan Pangan yang ada dalam Nawa Cita, juga terdapat Peningkatan Agroindustri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dan Agroindustri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat hingga 8,0 persen, tumbuhnya investasi 12,1 persen, serta ekspor yang diperkirakan tumbuh 12,2 persen di tahun 2019. Melalui upaya ketahanan pangan dan agroindustri, diharapkan sektor pertanian tumbuh 4,5 persen pertahun.

Dari kedua sub agenda kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri, maka Kementerian Pertanian hadir dengan visi "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Tercapainya visi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana sasaran strategis yang ditetapkan lima tahun ke depan, yang meliputi 1) meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; 2) terjaminnya distribusi pangan; 3) meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; 4) meningkatnya konsumsi pangan lokal; 5) stabilnya produksi cabai dan bawang merah; 6) berkembangnya produk bernilai tambah dan berdaya saing; 7) tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; 8) meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; 9) meningkatnya pendapatan keluarga petani; 10) meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan; serta 11) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

A. Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2010-2014

1. Produk Domestik Bruto

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 879,23 triliun rupiah atau 10,26 % dari PDB nasional yang besarnya 8.568,12 triliun rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Selama periode 2010-2014,

pertumbuhan PDB pertanian sempit tersebut berkisar antara 3,47 hingga 4,58 % dengan rata-rata sekitar 3,90 %, pada saat yang sama PDB nasional tumbuh sekitar 5,70 %. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan tersebut, maka kontribusi pertanian semakin menurun dari 10,99 % di tahun 2010 menjadi 10,26 % dari total PDB nasional di tahun 2014.

2. Penyediaan Lapangan Kerja

Selama periode 2010-2014, sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69 juta tenaga kerja atau sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agribisnis. Bila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar. Walaupun kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja nasional sangat besar, namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor Pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya.

Bila disandingkan data pertumbuhan pangsa tenaga kerja pertanian dengan pertumbuhan pangsa PDB, maka pada periode tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan pangsa tenaga kerja pertanian sebesar -4,16 %/tahun dan pada saat yang bersamaan terjadi pula penurunan pertumbuhan pangsa PDB sebesar -2,86 %/tahun. Dengan membandingkan tingkat penurunan pangsa tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat penurunan pangsa PDB, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan perkapita tenaga kerja di sektor pertanian semakin membaik.

3. Investasi Sektor Pertanian

Investasi sektor pertanian terdiri dari investasi swadaya petani, pemerintah dan swasta. Diperkirakan total investasi di sektor pertanian mencapai 400 trilyun rupiah di tahun 2014. Investasi sektor pertanian terbesar berasal dari swadaya petani dalam bentuk prasarana lahan serta sarana pendukungnya.

Sedangkan investasi pemerintah melalui APBN dan APBD yang diperkirakan hanya sekitar 4 % dari total investasi di sektor pertanian.
Kontribusi investasi swasta terhadap total investasi di sektor pertanian sangat kecil, namun peningkatan investasi swasta di sektor pertanian akan mencerminkan kondisi yang kondusif bagi sektor pertanian sebagai tujuan investasi. Investasi merupakan penggerak pertumbuhan PDB sektor pertanian dimana makin tinggi investasi, maka makin besar pertumbuhan PDB sektor pertanian.

Salah satu indikator aliran investasi ke sektor pertanian adalah persetujuan investasi di sektor tersebut. Selama periode 2010-2014 persetujuan investasi di sektor pertanian dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) fluktuatif namun masih meningkat dengan pertumbuhan sekitar 4,2 %/tahun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 18,6 %/tahun. Nilai investasi PMDN di sektor pertanian di tahun 2014 adalah sekitar 9,43 triliun rupiah, sedangkan untuk PMA sekitar 1,35 milyar US$.

Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada sub- sektor tanaman pangan dan perkebunan, dibandingkan dengan sub-sektor peternakan. Pada periode 2010–2014, realisasi investasi PMDN dan PMA pada sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai 98%. Sementara sisanya adalah investasi di sub-sektor peternakan.

Investasi PMDN pertanian di sektor sekunder berupa investasi industri hasil pertanian pada periode 2010-2013 mengalami penurunan sebesar 23%, sementara itu, investasi PMA meningkat dengan laju 14%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor primer. Hal ini terjadi karena pertanian Indonesia masih berupaya mencapai dan mempertahankan swasembada pangan terutama beras untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk dan konsumsinya.

4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus. Hal ini karena sumbangan surplus neraca perdagangan sub-sektor perkebunan yang relatif besar, sementara sub-sektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Laju pertumbuhan ekspor selama periode

2010-2014 sebesar 7,4 %/tahun, sementara laju pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 %/tahun, walaupun demikian secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh positif dengan laju 4,2 %/tahun (Gambar 5).

Bila ditelaah berdasarkan subsektor, maka kondisi perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia dalam posisi defisit atau dengan kata lain bahwa Indonesia menjadi negara *net importer*. Komoditas pangan yang menyumbang impor terbesar adalah gandum, kedelai diikuti oleh jagung dan beras. Sebaliknya komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah ubi kayu.

Neraca perdagangan produk hortikultura masih mengalami defisit. Namun demikian, kinerja ekspor produk hortikultura mengalami peningkatan rata sebesar 19,9 %/tahun, sedangkan impornya tumbuh hanya 12,6 %/tahun. Kondisi defisit neraca perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan sayur, sementara pada tanaman obat dan tanaman hias menunjukkan surplus perdagangan. Buah-buahan manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar sedangkan untuk kelompok sayuran adalah kol, wortel, tomat dan kentang. Sebaliknya, buah-buahan yang dominan menyedot devisa adalah durian dan jeruk dan untuk kelompok sayuran adalah bawang merah, bawang putih, kentang dan wortel.

Tabel Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014

Commented [bpk81]: ganti

No	Sub Sektor	Tahun (juta US$)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Tanaman Pangan					
	- Ekspor	478	585	161	185	205
	- Impor	3.894	7.024	8.273	7.519	7.690
	- Neraca	-3.416	-6.439	-8.111	-7.333	-7.484
2	Hortikultura					
	- Ekspor	391	491	473	434	522
	- Impor	1.293	1.686	1.755	1.529	1.637
	- Neraca	-902	-1.195	-1.282	-1.095	-1.114
3	Perkebunan					
	- Ekspor	30.703	40.690	32.453	29.476	29.722
	- Impor	6.028	8.844	4.656	4.241	4.028
	- Neraca	24.675	31.846	27.796	25.235	25.693
4	Peternakan					

No	Sub Sektor	Tahun (juta US$)				
		2010	2011	2012	2013	2014
	- Ekspor	951	1599	572	592	587
	- Impor	2.768	3.044	2871	3.175	3.798
	- Neraca	-1.816	-1.445	-2.298	-2.582	-3.210
	PERTANIAN					
	- Ekspor	32.522	43.365	33.661	30.689	31.038
	- Impor	13.983	20.598	17.556	16.465	17.154
	- Neraca	18.539	22.766	16.104	14.224	13.884

Sumber: BPS (diolah)

Sub-sektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor terbesar di sektor pertanian dengan nilai ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan nilai impornya. Sebagian besar produk perkebunan utama diekspor ke negara-negara lain. Sedangkan produk turunan yang diimpor adalah gula yang selama ini masih diimpor dalam bentuk *raw sugar*. Ekspor komoditas perkebunan hanya tumbuh dengan laju 6,9 %/tahun, sementara impor tumbuh dengan laju sebesar 22,2%/tahun. Laju pertumbuhan nilai ekspor sebagian komoditas perkebunan seperti kakao, tembakau dan teh mengalami percepatan, dan sebagian mengalami perlambatan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu.

Komoditas peternakan utama Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional terdiri dari daging (sapi, kambing/domba, babi, ayam), ternak hidup sumber daging (sapi, kerbau, babi, kambing), hati/jeroan, telur untuk konsumsi, dan susu. Laju pertumbuhan nilai ekspor sub-sektor peternakan rata-rata sebesar 43,8%/tahun, sedangkan laju pertumbuhan nilai impornya meningkat 33,9%/tahun. Kondisi ini mencerminkan defisit neraca perdagangan sub-sektor peternakan dan besaran defisit neraca perdagangan cenderung menurun. Secara keseluruhan, sumber defisit neraca perdagangan komoditas peternakan yang terbesar adalah impor susu, ternak sapi dan daging sapi, dengan jumlah yang sangat besar, sementara sumber surplus hanya ekspor ternak babi yang jumlahnya sangat kecil.

5. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani

sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumahtangga. Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan petani, penggunaan asumsi tingkat produksi yang tetap dinilai kurang relevan, karena kuantitas tetap berarti NTP tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. Dengan kata lain, bahwa NTP bukan mutlak sebagai ukuran kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.

Selama periode 2010 – 2014, secara umum NTP meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2013. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada tahun 2011. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani.

Peningkatan indeks harga yang diterima petani merupakan hasil dari kebijakan Kementerian Pertanian dalam upaya perlindungan harga komoditas pertanian, sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil kebijakan diluar kendali Kementerian Pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat memacu inflasi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar petani tidak terlalu progresif.

6. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Tingkat kesejahteraan petani diukur dari: (1) pendapatan per kapita; (2) tingkat kemiskinan dan (3) tingkat kerawanan pangan rumah tangga pertanian.

B. Pendapatan Perkapita

Kesejahte.aan petani yang diukur dengan pendapatan/kapita diperoleh dengan menghitung nilai produk domestik bruto (PDB) total, pertanian luas dan pertanian sempit masing-masing dibagi dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang terlibat dalam pertanian luas dan jumlah penduduk yang terlibat dalam pertanian sempit. Data yang tersedia di tingkat nasional untuk pertanian luas dan sempit adalah jumlah rumah tangga di masing-masing kategori. Oleh karena itu, untuk menghitung jumlah penduduk dalam pertanian luas dan sempit diperoleh dengan mengalikan jumlah rumah tangga masing-masing di pertanian luas dan sempit dengan jumlah anggota rumah tangga (diasumsikan jumlah anggota rumah tangga adalah empat orang). Berdasar perhitungan menunjukkan perkembangan pendapatan/kapita petani masing-masing untuk perhitungan berdasarkan PDB dengan harga konstan tahun 2000.

Berdasar harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 % dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010-2014. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan, namun demikian secara nominal tingkat pendapatan/kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2014 misalnya, tingkat pendapatan/kapita pertanian dalam arti luas dan sempit masing-masing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp 7.966/kapita/hari; padahal berdasarkan Bank Dunia batas garis kemiskinan adalah pendapatan US$ 2/kapita/hari, dengan tingkat kurs US$ terhadap rupiah tahun 2014 yang telah melewati Rp 10.000/1US$ tentu menunjukkan masih relatif rendahnya tingkat kesejahteraan petani atau penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Tabel Perkembangan PDB Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian Tahun 20010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp 000)

Tahun	PDB [illegible]	PDB Pertanian [illegible]	PDB Pertanian [illegible]
2010	9.703,46	7.116,64	6.120,72
2011	10.192,14	7.416,99	6.662,32
2012	10.683,12	7.950,24	6.947,53
2013	11.146,91	8.724,54	7.639,48
2014*	11.641,88	9.032,85	7.966,07

Sumber: BPS (diolah)
*Ket: * Data perkiraan*

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di pertanian didekati dengan menggunakan data jumlah dan persentase penduduk miskin di desa. Jumlah penduduk miskin di desa umumnya lebih banyak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan di kota. Pada periode 2010-2014, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2010 sebanyak 11,10 juta berkurang sebesar -2,25 %/tahun sehingga menjadi 10,13 juta di tahun 2014. Karena sebagian besar penduduk perdesaan bermata pencaharian di sektor pertanian, maka dapat dimaknai bahwa tingkat kemiskinan di sektor pertanian kondisinya lebih banyak dibanding di sektor lainnya.

2. Kerawanan Pangan Rumah Tangga

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan katagori *kronis* untuk jangka panjang dan *transien* untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.000 kkal/hari. Jika konsumsi perkapita adalah kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90 % dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90 % dari AKG termasuk katagori tahan pangan.

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan bencana tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Tabel Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010–2013

Rincian	2010	2011	2012	2013	Perubahan (2012-2013)
1. Jumlah Penduduk Sangat Rawan [a]:					
a. Jumlah (juta Jiwa)	35,71	42,08	47,65	47,02	5,96
ng dan Kedelai 35,71 15,34	15,34	17,41	19,46	19,04	4,81
2. Jumlah Penduduk Rawan [b]:					
a. Jumlah (juta Jiwa)	72,44	78,49	80,58	83,65	3,23
b. Persentase	31,12	32,48	32,91	33,87	2,12
3. Jumlah Penduduk Tahan Pangan [c]:					
a. Jumlah (juta Jiwa)	124,61	121,0	116,61	116,31	-1,95
b. Persentase	53,53	1,00	47,63	47,09	-3,03

Sumber data: BPS tahun 2011 - 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian,
Catatan: (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; dan (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Jumlah penduduk yang sangat rawan pangan pada tahun 2011 sekitar 42,08 juta orang bertambah menjadi 47,65 juta pada tahun 2012, pada tahun 2013 menurun sedikit menjadi 47,02 juta. Sementara itu, penduduk yang rawan pangan pada tahun 2011 mencapai 78,49 juta orang, bertambah menjadi 80,58 juta pada tahun 2012, dan bertambah lagi menjadi 83,65 juta pada tahun 2013. Sedangkan penduduk tahan pangan pada tahun 2011 sebanyak 121,01 juta orang, menurun menjadi 116,61 juta pada tahun 2012, dan pada tahun 2011 berkurang menjadi 116,31 juta. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan.

C. Capaian Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2010-2014

1. Produksi Tanaman Pangan

Produksi padi antara tahun 2010-2014 meningkat rata-rata sebesar 1,63 %/tahun. Demikian pula produksi jagung meningkat walaupun dengan tingkat yang lebih rendah yaitu sekitar 1,11 %/tahun dan produksi kedelai meningkat sebesar 1,93 %/tahun.

Tabel Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditi		2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertumbuhan (%)
			(ribu ton)					
1	Padi	Jawa	36.375	34.405	36.527	37.493	36.659	0,29
		Luar Jawa	30.094	31.352	32.529	33.787	34.173	3,24
		Indonesia	66.469	65.757	69.056	71.280	70.832	1,63
2	Jagung	Jawa	9.944	9.467	10.712	10.095	10.159	0,81
		Luar Jawa	8.383	8.176	8.675	8.416	8.874	1,52
		Indonesia	18.328	17.643	19.387	18.512	19.033	1,11
3	Kedelai	Jawa	633	574	604	522	622	0,37
		Luar Jawa	274	277	240	258	332	5,98
		Indonesia	907	851	844	780	954	1,93

Ket: 2014 data ASEM

Tabel Luas Panen Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditi		2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertumbuhan (%)
			(ribu hektar)					
1	Padi	Jawa	6.358	6.165	6.186	6.467	6.000	0,20
		Luar Jawa	6.895	7.038	7.260	7.368	7.393	1,76
		Indonesia	13.253	13.203	13.446	13.835	13.793	1,01
2	Jagung	Jawa	2.139	1.945	2.011	1.959	1.954	-2,13
		Luar Jawa	1.993	1.919	1.946	1.863	1.844	-1,36
		Indonesia	4.132	3.864	3.957	3.821	3.838	-1,77
3	Kedelai	Jawa	439	404	382	343	379	-3,28
		Luar Jawa	221	218	186	208	236	2,31
		Indonesia	660	622	568	551	615	-1,45

Ket: 2014 data ASEM

Tabel Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditi		2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertumbuhan (%)
			(ku/ha)					%
1	Padi	Jawa	57,21	55,81	59,05	57,98	57,28	0,08
		Luar Jawa	43,65	44,54	44,81	45,85	46,22	1,45
		Indonesia	50,15	49,80	51,36	51,52	51,35	0,60
2	Jagung	Jawa	46,49	48,65	53,26	51,54	51,98	2,94
		Luar Jawa	42,07	42,61	44,57	45,19	47,11	2,88
		Indonesia	44,36	45,65	48,99	48,44	49,59	2,87
3	Kedelai	Jawa	14,40	14,20	15,80	15,23	16,42	3,49
		Luar Jawa	12,38	12,71	12,90	12,41	14,06	3,38
		Indonesia	13,73	13,68	14,85	14,16	15,51	3,25

Ket: 2014 data ASEM

Pemicu peningkatan produksi padi diantaranya karena peningkatan luas panen seluas 540 ribu ha dan produktivitas sebesar 1,20 ku/ha. Pertumbuhan luas panen padi di Jawa hanya sekitar 0,20 %/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,76 %/tahun. Demikian pula dengan peningkatan produktivitas padi di Jawa hanya sekitar 0,08 %/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,45 %/tahun.

Peningkatan produksi jagung terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sekitar 2,87 %/thn, walaupun luas panen mengalami penurunan sekitar -1,77 %/tahun. Luas panen jagung baik di Jawa maupun di luar Jawa mengalami penurunan. Sedangkan luas panen kedelai terjadi penurunan yang besar di Jawa (-3,28 %/thn) dan meningkat di luar Jawa (2,31 %/thn). Produktivitas jagung dan kedelai baik di Jawa maupun di luar Jawa mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Produksi Hortikultura

Produksi komoditas utama hortikultura selama kurun waktu 2010–2014 menunjukkan pola yang berfluktuatif. Hal ini terjadi tidak hanya pada komoditas sayuran, tetapi juga pada kelompok komoditas buah dan florikultura. Selama periode tahun 2010-2014, laju pertumbuhan produksi tertinggi adalah pada komoditas mangga yaitu sebesar 21,95 %/tahun, disusul manggis, krisan dan temulawak masing-masing sebesar 13,82 %, 12,26 % dan 11,00 %. Sebaliknya laju pertumbuhan produksi terkecil yaitu pada cabe merah, kentang dan jeruk yang pertumbuhannya di bawah 4,13 %/tahun.

Komoditas utama hortikultura yang mengalami peningkatan produktivitas yang tinggi diantaranya krisan, salak, dan cabe rawit. Namun demikian ada juga komoditi hortikultura yang mengalami penurunan produktivitas seperti mangga, jeruk, manggis dan temulawak.

Tabel Produksi Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014

No	Komoditas						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(ton)					
1	Cabe Besar	807.160	888.85	954.310	1.012.8	926.000	3,76
2	Cabe Rawit	521.704	594.22	702.214	713.502	598.700	4,40
3	Bawang Merah	1.048.934	893.12	964.195	1.010.7	1.201.9	4,21
4	Kentang	1.060.805	955.48	1.094.2	1.124.2	1.211.4	3,77

No.	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(ton)					
5	Mangga	1.287.287	2.131.	2.376.3	2.192.9	2.598.0	21,95
6	Pisang	5.755.073	6.132.	6.189.0	6.279.2	7.070.4	5,38
7	Jeruk	2.028.904	1.818.	1.611.7	1.654.7	2.243.8	4,13
8	Durian	492.139	883.96	888.127	759.055	846.503	19,27
9	Manggis	84.538	117.59	190.287	139.602	113.096	13,82
10	Salak	749.876	1.082.	1.035.4	1.030.4	980.969	8,68
11	Temulawak	26.671	24.105	44.085	33.441	31.729	11,00
12	Krisan **	185.232	305.86	397.651	387.208	218.910	12,26
13	Melati	21.600	22.541	22.862	30.258	26.544	6,46

Ket:
**) Angka Sementara*
***)Satuan produksi dalam ribu tangkai*
****) Satuan produksi dalam Kg*

Bila dilihat dari luas panen, maka komoditas hortikultura yang mengalami peningkatan luas panen adalah mangga, manggis, durian dan temu lawak. Komoditas lain tidak mengalami kenaikan luas panen yang signifikan, bahkan beberapa diantaranya cenderung menurun.

Tabel Luas Panen Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014

No.	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(ha)					
1	Cabe Besar	122.755	121.063	120.275	124.110	113.078	(1,93)
2	Cabe Rawit	114.350	118.707	122.091	125.122	105.196	(1,71)
3	Bawang Merah	109.634	93.667	99.519	98.937	116.977	2,33
4	Kentang	66.531	59.882	65.989	70.187	75.778	3,54
5	Mangga	131.674	208.280	219.667	247.239	298.983	23,93
6	Pisang	101.276	104.156	103.158	103.449	117.864	4,03
7	Jeruk	57.083	51.688	51.793	53.516	43.170	(6,34)
8	Durian	46.290	69.045	63.189	61.246	68.983	12,53
9	Manggis	10.231	16.180	17.850	18.200	15.305	13,62
10	Salak	27.223	24.729	26.944	29.711	28.366	1,15
11	Temulawak **	14.406	13.599	18.606	19.069	19.125	10,06
12	Krisan **	10.535	8.811	9.852	9.080	5.127	(13,08)
13	Melati **	8.115	7.522	8.278	9.790	8.270	1,57

Ket:
**) Angka Sementara*
***) Satuan dalam ribu m2*

Tabel Produktivitas Komoditas Utama Hortikultura

Tahun 2010-2014

No	Komoditas						Rerata Pertumbuhan
				(ton/ha)			(%/thn)
1	Cabe Besar	6,58	7,34	7,93	8,16	8,19	5,71
2	Cabe Rawit	4,56	5,01	5,75	5,70	5,69	5,90
3	Bawang Merah	9,57	9,54	9,69	10,22	10,27	1,73
4	Kentang	15,94	15,96	16,58	16,02	15,99	0,08
5	Mangga	9,78	10,23	10,82	8,87	8,69	(3,41)
6	Pisang	56,83	58,88	60,70	60,00	59,99	1,38
7	Jeruk	52,82	58,04	52,66	51,99	51,98	(0,17)
8	Durian	10,63	12,80	14,06	12,39	12,27	3,95
9	Manggis	8,26	7,27	10,66	7,67	7,39	(2,00)
10	Salak	27,55	43,76	38,43	34,68	34,58	8,89
11	Temulawak ***	1,85	1,77	2,37	1,87	1,66	(0,49)
12	Kr san **	17,58	34,71	40,36	42,64	42,70	29,87
13	Melati ***	2,66	3,00	2,76	3,09	3,21	5,13

Ket:

**) Angka Sementara*

***) Satuan produksi dalam tangkai/m2*

****) Satuan dalam Kg/m2*

3. Produksi Perkebunan

Pola pertumbuhan produksi komoditas perkebun. an unggulan nasional selama periode 2010-2014 bervariasi. Terdapat 12 komoditas yang menunjukkan pola positif, yaitu tembakau, kelapa sawit, kapas, cengkeh, karet, tebu, lada, kopi, nilam, kakao dan kelapa. Sedangkan tiga komoditas lainnya, yaitu jarak pagar, teh dan jambu mete karena berbagai kendala menunjukkan pola pertumbuhan produksi negatif dengan laju penurunan rata-rata sekitar -1,18 sampai -12,14 %/tahun. Kemiri sunan tidak mengalami kinerja produksi yang menggembirakan karena sampai dengan tahun 2013 capaian produksi sangat rendah.

Tabel Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014

No	Komoditas						Rerata Pertumbuhan
				(ton)			(%/thn)
1	Karet	2.734.854	2.990.184	3.012.254	3.107.544	3.204.503	4,09
2	Kelapa Sawit	21.958.120	23.096.541	26.015.518	27.746.125	29.512.764	7,71
3	Kelapa	3.166.666	3.174.379	3.189.897	3.228.110	3.262.721	0,75
4	Kopi	686.921	638.646	691.163	698.887	711.513	1,03
5	Kakao	837.918	712.231	740.513	777.539	817.322	-0,23
6	Jambu Mete	115.149	114.789	116.915	117.537	118.174	0,65

		(ton)					(%/thn)
7	Lada	83.663	87.089	88.160	89.724	89.622	1,75
8	Cengkeh	98.386	72.207	99.890	100.725	101.670	3,38
9	Teh	156.604	150.776	145.575	146.682	147.704	-1,43
10	Jarak Pagar	7.081	6.576	6.424	6.218	3.023	-16,01
11	Kemiri Sunan	2	1	0	0	0	数37.50
12	Tebu	2.290.116	2.267.887	2.591.687	2.550.991	2.790.000	5,28
13	Kapas	3.174	2.275	2.948	853	1.782	9,78
14	Tembakau	135.678	214.524	260.818	260.183	261.659	20,00
15	Nilam	2.206	2.866	2.648	2.659	2.690	5,97

Ket:
**) Data sementara*
***) Data estimasi*
Setelah tahun 2011, tanaman kemiri sunan tidak dipanen karena tidak ada UPH (unit pengolahan hasil) sehingga tidak ada realisasi produksi

Berbagai komoditi perkebunan sebagian diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN biasanya mengelola komoditas kelapa sawit, teh dan karet.

Tabel Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014

		(ha)					(%/thn)
1	Karet	3.445.415	3.456.128	3.506.201	3.555.763	3.606.128	0,98
2	Kelapa Sawit	8.385.394	8.992.824	9.572.715	10.010.824	10.261.784	5,46
3	Kelapa	3.739.350	3.767.704	3.781.649	3.787.283	3.792.511	-0,03
4	Kopi	1.210.365	1.233.698	1.235.289	1.240.919	1.246.545	-0,29
5	Kakao	1.650.356	1.732.641	1.774.463	1.852.944	1.944.663	4,15
6	Jambu Mete	570.930	575.841	575.920	576.181	577.168	0,15
7	Lada	179.318	177.490	177.787	178.251	178.945	-0,75
8	Cengkeh	470.041	485.191	493.888	494.462	495.404	1,18
9	Teh	122.898	123.938	122.206	122.545	122.991	-0,08
10	Jarak Pagar	50.106	47.676	47.397	47.407	28.581	-10,02
11	Kemiri Sunan	918	944	962	962	995	5,20
12	Tebu	454.111	451.788	451.255	469.227	449.873	0,42
13	Kapas	10.194	10.238	9.565	3.130	5.600	-2,75
14	Tembakau	216.271	228.770	270.290	270.232	270.992	5,99
15	Nilam	24.472	28.008	29.381	29.783	31.288	5,10

Ket:
**) Data sementara*
***) Data estimasi*

Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/benih bervarietas unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT), pemeliharaan kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Untuk tembakau, dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada daerah penghasil tembakau, menjadikan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para pekebun tembakau di wilayahnya secara intensif.

Tabel Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan

Tahun 2010-2014

No	Komoditas						Kenaikan Produksi
		(kg/ha)					(%/thn)
1	Karet	793,77	865,18	859,12	873,95	1.107,00	9,17
2	Kelapa Sawit	2.618,62	2.568,33	2.717,67	2.771,61	3.982,00	12,39
3	Kelapa	846,85	842,52	843,52	852,36	1.181,00	9,80
4	Kopi	567,53	517,67	559,52	563,20	763,00	8,86
5	Kakao	507,72	411,07	417,32	419,62	911,00	25,03
6	Jambu Mete	201,69	199,34	203,01	203,99	367,00	20,27
7	Lada	466,56	490,67	495,87	503,36	782,00	15,77
8	Cengkeh	209,31	148,82	202,25	203,71	330,00	17,43
9	Teh	1.274,26	1.216,54	1.191,23	1.196,96	1.480,00	4,38
10	Jarak Pagar	462,00	434,00	310,00	302,00	246,00	-13,94
11	Kemiri Sunan	667,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tebu	5.043,08	5.019,80	5.743,28	5.436,58	6.543,84	7,24
13	Kapas	311,36	222,18	308,19	272,52	325,00	4,44
14	Tembakau	627,35	937,73	964,96	962,81	973,00	13,30
15	Nilam	119,00	132,00	144,00	145,00	109,00	-1,03

Ket:
**) Data sementara*
***) Data estimasi*

Pengembangan tanaman karet difokuskan pada sentra-sentra pengembangan di koridor ekonomi MP3EI Sumatera dan Kalimantan serta perluasan areal di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca konflik, pemberdayaan petani dan pembangunan/pemeliharaan kebun sumber bahan tanam.
Peningkatan produksi tebu cukup signifikan sebagai hasil dari kegiatan perluasan areal tebu dan penerapan sistem tebangan Manis, Bersih dan Segar (MBS), fasilitasi penyediaan benih unggul bermutu, bantuan alat dan sarana produksi bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan areal pada daerah potensial pengembangan tebu.

Untuk tanaman bahan baku energi terbarukan, pengembangan kemiri sunan selama periode 2010-2014 baru dimulai rintisannya pada tahun 2011 dan diarahkan pada perluasan areal penanaman sehingga diproyeksikan baru berproduksi pada tahun 2015. Jarak pagar masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar dapat dihasilkan varietas unggul baru, teknik budidaya jarak pagar yang produktivitasnya tinggi dan sistem usahanya di tingkat petani yang dapat menghasilkan keuntungan. Kementerian Pertanian sudah mengembangkan kopi *specialty* jauh sebelum tahun 2009 yang memiliki cita rasa khas tertentu dari daerah sentra pengembangan kopi baik arabika maupun robusta.

Penurunan produksi pada beberapa komoditas disebabkan karena anomali iklim. Selain itu, penurunan produksi disebabkan oleh penurunan luas areal, serta rendahnya produktivitas karena tanaman tua seperti yang dialami pada perkebunan teh. Selain itu menurunnya produksi juga disebabkan pada komoditi yang mengalami tingkat harga yang kurang menguntungkan seperti pada komoditas teh sehingga petani kurang bergairah merawat tanamannya.

4. Produksi Peternakan

Produksi hasil peternakan terdiri dari produksi daging, telur, dan susu. Produksi secara nasional untuk daging dan telur selama tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti yaitu masing masing sebesar 5,98 dan 7,08 %/thn. Sedangkan produksi susu mengalami penurunan sebesar -2,73 %/thn.

Tabel Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010 – 2014

No	Komoditas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rata-rata [illegible]
		(ribu ton)					(%/thn)
	DAGING:	2.366,2	2.554,20	2.666,10	2.882,00	2.982,60	5,98
1	Sapi	436,5	485,3	508,9	504,8	540	5,55
2	Kerbau	35,9	35,3	37	37,8	41,2	3,58
3	Kambing	68,8	66,3	65,2	65,2	67,9	-0,29
4	Domba	44,9	46,8	44,4	41,5	43,6	-0,59
5	Babi	212	224,8	232,1	298,4	311,1	10,53
6	Kuda	2	2,2	2,9	1,8	2,5	10,69
7	Ayam Buras	267,6	264,8	267,5	319,6	332,1	5,84
8	Ayam Ras	57,7	62,1	66,1	77,1	81	8,94
9	Ayam Ras	1.214,3	1.337,90	1.400,50	1.497,90	1.524,90	5,90
10	Itik	26	28,2	30,1	32,1	32,5	5,77
11	Kelinci	0,1	0,2	0,4	0,6	0,5	58,33
12	Burung		0,1	6,9	0,9	0,9	2.237,68
13	Merpati	0,4	0,1	0,6	0,2	0,2	89,58
14	Itik Manila			3,6	4	4,4	10,56
	TELUR:	1.379,6	1.479,80	1.628,70	1.728,30	1.812,80	7,08
15	Ayam Buras	175,5	187,6	197,1	194,6	197,4	3,03
16	Ayam Ras	945,6	1.027,80	1.139,90	1.224,40	1.299,20	8,28
17	Itik	245	256,2	265	264,1	267,8	2,27
18	Burung	13,4	8,2	15,8	18,9	19,1	18,64
19	Itik Manila			11	26,3	29,3	75,25
20	SUSU	909,5	974,7	959,7	786,8	798,4	-2,73

*Sumber data : Data Statistik Ditjen PKH 2013, *= angka sementara*

Produksi daging tahun 2014 mencapai 2,98 juta ton. Produksi daging ini sebagian besar yaitu 52% berasal dari daging ayam ras pedaging. Sedangkan daging sapi berkontribusi 19,2% terhadap total produksi daging nasional. Sedangkan produksi telur tahun 2014 mencapai 1,81 juta ton, yang terdiri dari telur ayam ras petelur (71,1%) dan lainnya berupa telur ayam buras, itik burung puyuh dan itik manila.

Tabel Populasi Ternak Tahun 2010 – 2014

No	Komoditas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rata-rata [illegible]
		(Ribu ekor)					(%/thn)
I	RUMINANSIA						
1	Sapi Potong	13.582	14.824	15.981	12.686	14.703	3,1
2	Sapi Perah	488	597	612	444	483	1,5
3	Kerbau	2.000	1.305	1.438	1.110	1.321	(7,1)
4	Kambing	16.620	16.946	17.906	18.500	19.216	3,7
5	Domba	10.725	11.791	13.420	14.926	15.716	10,1
II	NON RUMINANSIA						0,0
1	Babi	7.477	7.525	7.900	7.611	7.873	1,4
2	Kuda	419	409	437	434	455	2,2
3	Kelinci	834	760	1.075	1.137	1.054	7,8
III	UNGGAS						0,0
1	Ayam Buras	257.544	264.340	274.56	276.77	286.538	2,7

No	Komoditas						Pertumbuhan
		(Ribu ekor)					(%/thn)
2	Ayam Ras Petelur	105.210	124.636	138.71	146.62	154.657	10,2
3	Ayam Ras Pedaging	986.872	1.177,9	1.244,	1.344,	1.481,8	10,8
4	Itik	44.302	43.488	44.357	43.710	44.095	(0,1)
5	Puyuh				12.553	12.635	18,5
6	Merpati				2.139	2.163	53,9
7	Itik Manila			4.938	7.645	8.680	34,2

*Sumber data : Data Statistik Ditjen PKH 2013, *= angka sementara*

Produksi susu nasional tahun 2014 mencapai 0,79 juta ton. Produksi susu ini masih terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana mencapai 97 % dari total produksi susu nasional.

D. Faktor Pendukung Pembangunan Pertanian

1. APBN Kementerian Pertanian

Selama tahun 2010 hingga tahun 2014, alokasi APBN Kementerian Pertanian memperlihatkan tren yang terus meningkat, kecuali di tahun 2014 mengalami penurunan. APBN Kementerian Pertanian tercatat sebesar Rp 8,03 triliun pada tahun 2010, kemudian terus meningkat secara fluktuatif hingga pada tahun 2014 mencapai Rp 13,61 triliun.

Tabel Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Juta rupiah					
1	Sekretariat Jenderal	1.417.466	555.151	603.977	550.196	1.103.063	4.229.852
2	Inspektorat Jenderal	66.097	67.510	67.237	69.837	65.528	336.209
3	Ditjen Tanaman Pangan	892.368	2.839.939	4.522.601	3.138.097	2.273.832	13.666.837
4	Ditjen Perkebunan	454.116	1.975.106	1.459.989	1.772.821	1.316.320	6.978.352
5	Ditjen Peternakan	940.690	2.297.274	2.542.691	2.292.426	1.391.464	9.464.544
6	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	326.709	404.068	503.078	650.842	502.959	2.387.656
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	755.184	5.260.940	4.473.221	3.773.473	2.715.886	16.978.703
8	Ditjen Hortikultura	330.276	606.336	565.520	809.546	524.670	2.836.348
9	Badan Litbang Pertanian	908.282	1.103.372	1.267.436	1.778.051	1.558.099	6.615.240
10	Badan Pengembangan SDM Pertanian	1.161.788	1.319.925	1.416.122	1.434.296	1.098.836	6.430.967
11	Badan Ketahanan Pangan	397.684	628.970	687.547	692.070	458.545	2.864.816
12	Badan Karantina Pertanian	387.390	542.867	734.304	857.891	603.845	3.126.296
	TOTAL	8.038.049	17.601.457	18.843.722	17.819.545	13.613.046	75.915.819

Bila diakumulasikan selama periode 2010 - 2014, total anggaran Kementerian Pertanian sekitar Rp 75,91 trilyun. Anggaran terbesar adalah untuk mendukung program pengembangan infrastruktur pertanian pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (22%), disusul dengan program pada Ditjen Tanaman Pangan (18%) dan program pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (12%).

2. Pengembangan Kapasitas Institusi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mendukung tercapainya Empat Target Sukses Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian telah melakukan penataan manajemen pembangunan dan pemerintahan di bidang pertanian. Secara garis besar pengembangan kapasitas institusi Kementerian Pertanian telah dilakukan melalui: (1) pengembangan sumber daya manusia aparatur; (2) penguatan organisasi dan (3) reformasi kelembagaan. Disamping itu telah dilakukan identifikasi kesenjangan kapasitas institusi seluruh unit kerja serta pengembangan kompetensi aparatur untuk dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan dan mengkoordinasikan pembinaan pembangunan di sektor pertanian. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.

Salah satu kebijakan pembangunan pertanian 2010-2014 yang telah berhasil dilakukan adalah peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip *clean goverment* dan *good governance*. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai capaian audit kinerja birokrasi dan audit laporan keuangan serta semakin menurunnya kerugian negara dari penyimpangan pengelolaan APBN. Kondisi tersebut telah dicapai melalui: (1) penataan unit kerja di pusat maupun di daerah (UPT), (2) Peningkatan kapasitas aparatur untuk pengembangan sikap dan perilaku, (3) peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis melalui kegiatan reguler dalam bentuk serangkaian workshop, simposium, seminar, pendidikan dan pelatihan serta (4) pembinaan etos kerja, moral dan disiplin pegawai. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur juga telah dilakukan melalui (1) perbaikan sistem dan prosedur kerja, (2) penataan pola rekruitmen calon pegawai dan (3) pengembangan rumpun jabatan fungsional; (4) perbaikan sarana dan

lingkungan kerja; serta (5) penerapan manajemen modern dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan pertanian.

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketahanan pangan sebagai urusan wajib di daerah, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang* Ketahanan Pangan. Namun demikian dalam operasionalnya SPM Bidang Ketahanan Pangan belum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, karena rumusan indikator yang dituangkan merupakan *outcome* yang untuk mengoperasionalkannya membutuhkan bimbingan teknis kepada aparat daerah untuk memahami konsep dan definisi ketahanan pangan.

Penataan kelembagaan juga telah dilakukan terhadap kelembagaan yang bersifat non struktural di lingkungan Kementerian Pertanian, antara lain: Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, Komisi Minyak Sawit Indonesia, Badan Benih Nasional, Dewan Gula Indonesia, Dewan Kakao Indonesia, dan Dewan Rempah Indonesia. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan tugas spesifik atau tugas penunjang dari unit struktural yang secara tidak langsung telah mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian.

Secara umum upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam penataan kelembagaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

   Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan uraian rincian tugas pekerjaan sampai Eselon IV di lingkup Kementerian Pertanian. Di samping itu telah dilakukan pengembangan 10 Rumpun Jabatan Fungsional Ilmu Hayati dan jabatan fungsional lainnya. Namun demikian, uraian tugas ini belum mengatur secara jelas kedudukan dan tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional khusus dan fungsional umum. Di samping itu, sejalan dengan anggaran berbasi kinerja dan untuk diterapkannya remunerasi penuh, maka akan disusun uraian tugas hingga ke pegawai secara individual yang dikenal dengan nama Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

b. Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian telah berupaya mewujudkan keberadaan organisasi UPT di daerah yang mandiri dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mendukung otonomi daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui: penguatan fasilitas prasarana, sarana dan personil. Saat ini UPT Kementerian Pertanian berjumlah 158 unit, yang tersebar di masing-masing Eselon I.

c. Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menyusun organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud. Namun demikian, pada kenyataannya struktur dan nomenklatur SKPD lingkup pertanian di daerah sangat beragam dan dukungan pendanaan APBD masih relatif terbatas untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan di daerah.

3. Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis

Ditinjau dari peranannya dalam sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan serapan tenaga kerja, sumbangan PDRB sektor pertanian sekitar 15,04%, dengan menanggung lebih dari 36,42% tenaga kerja dapat dikatakan memiliki peranan yang tidak proporsional (BPS, Februari 2014). Rendahnya sumbangan PDRB ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian yang menyebabkan lambatnya adopsi berbagai teknologi tepat guna dan minimnya pemanfaatan peluang-peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, sebanyak 11,5% tenaga kerja di sektor pertanian sebagian besar merupakan tenaga kerja yang berusia antara 40 – 44 tahun dan disusul sebanyak 11,0% tenaga kerja kelompok usia 44 - 45 tahun.

Dilihat dari sisi pendidikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2012, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat sekolah dasar mencapai 74,5%, disusul oleh lulusan sekolah menengah pertama sebesar 15,7% dan lulusan sekolah menengah atas sebesar 9.15%. Kondisi ini sangat timpang dengan ketenagakerjaan pada sektor industri pengolahan dan jasa. Pada sektor industri pengolahan sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 14,8% dan pada berbagai sektor jasa sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 33,4%. Ketimpangan ini yang menyebabkan perbedaan pendapatan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa.

Tabel Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Tahun 2010 - 2014

[illegible]	[illegible]					
	Laki-laki (orang)	Pertum buhan (%)	Perempuan (orang)	Pertum buhan (%)	[illegible]	[illegible]
2010	23.781.233	0,36	14.917.810	0,02	38.699.043	0,23
2011	22.482.257	(5,46)	14.059.715	(5,75)	36.541.972	(5,57)
2012	22.339.140	(0,64)	14.090.110	0,22	36.429.250	(0,31)
2013	22.095.252	(1,09)	13.952.948	(0,97)	36.048.200	(1,05)
2014	21.903.063	(0,87)	13.866.085	(0,62)	35.769.148	(0,77)
Rerata 2010 - 2014	22.520.189	(1,54)	14.177.334	(1,42)	36.697.523	(1,49)

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP (2013)

Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa diperlukan untuk mengurangi beban tenaga kerja di sektor pertanian. Namun perpindahan tersebut idealnya proporsional dalam hal umur dan tingkat pendidikan sehingga tetap ada regenerasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0.64% per tahun pada periode tahun 2005–2009, dan penurunan sebesar 1.49% per tahun antara tahun 2010 sampai tahun 2014. Penurunan pertumbuhan tenaga kerja terbesar justru pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 3.41% per tahun.

Tabel Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Umur Tahun 2008 - 2012

Tahun	15-29 Tahun	30-44 Tahun	45-59 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
2008	9.312.562	13.009.636	10.706.534	5.246.159	38.364.981
2009	9.273.128	13.062.569	10.871.778	5.402.522	38.609.997
2010	8.421.813	13.353.185	11.381.631	5.542.414	38.699.043
2011	8.416.895	12.782.136	10.484.742	4.858.199	36.541.972
2012	8.081.531	12.848.562	10.402.542	5.096.615	36.429.250
Rerata Pertumbuhan	-3.41	-0.45	-0.61	-0.47	-1.25

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP (2013)

Tabel Jumlah Kelompok Tani Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah [illegible]	[illegible]	Jumlah [illegible]	[illegible]
2010	279.523	3,21	30.636	8,24
2011	299.759	7,24	36.244	18,31
2012	307.309	2,52	37.237	2,74
2013	318.453	3,63	37.632	1,06
2014				
Rerata	301.261	4,15	35.437	7,59

Sumber : Badan PPSDMP(2014)

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa menjadi faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung meruakan gambaran pemulihan sebagian petani yang tidak menghendaki generasi penerusnya untuk menjadi petani juga. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Untuk menumbuhkan minat generasi muda telah dilakukan berbagai upaya termasuk mengembangkan dan memperkenalkan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat tani baik laki-laki maupun perempuan, khususnya golongan muda dalam melakukan produksi di tingkat *on-farm* dan *off-farm*. Selain itu, dibuka akses yang lebih besar pada pemuda, terutama kepada yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat

SLTA atau perguruan tinggi untuk dapat membuka usaha di bidang pertanian. Dalam meningkatkan keterampilan petani, telah dikembangkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga milik petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumberdaya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan. Lembaga pelatihan ini merupakan lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun kelompok. Selain itu, dikembangkan pula Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) yang merupakan kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan pedesaan. LM3 dikembangkan pada lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, seminari, paroki, pasraman dan vihara.

4. Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam Pertanian

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, bibit/benih, pupuk, pestisida, alsintan, investasi dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya. Kementerian Pertanian melalui kewenangan yang dimilikinya melakukan pengaturan dalam optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana ini dengan mengeluarkan berbagai regulasi. Selain itu melalui anggaran pembangunan yang ada, telah dilakukan berbagai inisiatif awal untuk peningkatan kapasitas prasarana dan sarana yang ada.

Dana pembangunan untuk prasarana dan sarana pertanian merupakan komponen terbesar dari alokasi anggaran untuk Ketahanan Pangan yang dialokasikan ke Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan lainnya. Dari alokasi anggaran untuk Ketahanan Pangan yang di alokasikan pemerintah pada tahun 2014, sebanyak 31,5 triliun atau 43,5% dari total anggaran digunakan untuk prasarana dan sarana. Jumlah ini sebenarnya lebih besar lagi, karena dari alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian di tahun 2014 sebesar 15,5 triliun, sebesar 3,195 triliun dialokasikan untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dimana sebagian besar mandatnya terkait dengan prasarana dan sarana pertanian.

Pembiayaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana irigasi sesuai kewenangannya (primer dan sekunder). Sedangkan di Kementerian Pertanian dilakukan perbaikan dan pembangunan irigasi di tingkat usahatani (tersier) sekaligus bertindak sebagai fasilitator dan regulator dengan pokok kegiatan mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan monev kegiatan di seluruh Provinsi.

Tabel Anggaran APBN di Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Trilyun rupiah)					
I. Kementerian Negara/Lembaga	12,8	11,1	20,2	23,3	22,5	22,1
1. 018 Kementerian Pertanian	7,7	8,0	16,0	18,2	16,4	15,5
2. 033 Kementerian PU (irigasi)	5,1	3,1	4,2	5,1	6,1	6,6
II. Non K/L	36,9	39,2	37,6	40,8	49,5	50,3
1. Subsidi	32,9	35,7	33,0	33,1	40,9	41,4
a. Subsidi Pangan	13,0	15,2	16,5	19,1	21,5	18,8
b. Subsidi Pupuk	18,3	18,4	16,3	14,0	17,9	21,0
c. Subsidi Benih	1,6	2,2	0,1	0,1	1,5	1,6
2. Belanja Lain-lain	1,0	1,0	1,5	4,5	4,4	4,0
a. Cadangan beras pemerintah	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
b. Cadangan stabilisasi pangan				1,4	2,0	2,0
c. Cadangan benih nasional			0,5	0,3	0,4	0,0
d. Cadangan ketahanan pangan				0,7		
3. Transfer ke Daerah (DAK)	3,0	2,5	3,1	3,2	4,2	4,9
a. DAK Irigasi	1,5	1,0	1,3	1,3	1,6	2,3
b. DAK Pertanian	1,5	1,5	1,8	1,9	2,5	2,6

Secara rinci gambaran pengembangan prasarana dan sarana 2010-2014 adalah sebagai berikut.

a. Sumberdaya Lahan dan Air

Salah satu masalah utama terkait dengan sumberdaya lahan adalah akurasi data tentang lahan pertanian. Hal ini menjadi perhatian khusus Menteri Pertanian, sehingga pada perencanaan awal kegiatan Kementerian Pertanian masalah perbaikan akurasi data lahan ini menjadi salah satu prioritas

utama. Selama tahun 2010-2014 perbaikan dan penyempurnaan data lahan, salah satunya diupayakan melalui kegiatan audit lahan dengan memetakan sebaran luas dan jenis lahan sawah di luar Jawa dan di luar kawasan hutan pada skala 1:10.000. Selama tahun 2010-2014, Kementerian pertanian telah berhasil mencetak areal pertanian baru seluas 347.984 hektar. Bila dilihat kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang diperkirakan sekitar 50-100 ribu hektar setahunnya, maka pencetakan areal pertanian baru ini baru dapat mempertahankan luasan areal pertanian pangan yang ada. Sementara itu kualitas lahan yang baru dicetak umumnya produktivitasnya masih dibawah lahan yang dialihfungsikan. Upaya pencetakan areal pertanian baru banyak mengalami hambatan di lapang, terutama sulitnya mendapatkan areal yang siap untuk dicetak sebagai areal pertanian baru.

Tabel Realisasi dari Target Perluasan dan Pengelolaan Lahan serta Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2010-2014

No.	Uraian	Satuan	2010		2011		2012		2013		2014	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
A.	Perluasan dan Pengelolaan Lahan											
1	Perluasan Areal TP, Horti, Bun, dan Nak	Ha	28.892	90,67	103.417	92,48	107.463	91,76	72.175	93,66	36.033	79,38
2	Optimalisasi Lahan	Ha	6.360	100,00	23.033	93,11	198.184	94,46	253.660	100,00	118.200	68,80
3	Jalan Pertanian	Km	948	100,00	1.487	89,69	442	98,88	291	99,32	DAK	DAK
4	Pengembangan Metode SRI	Ha	1.240	100,00	10.190	91,31	54.993	91,20	205.800	100,00	136.750	82,67
5	Pra Pasca Sertifikasi Lahan	Persil	54.847	77,63	32.000	106,67	72.300	95,26	42.188	64,36		0,00
B.	Pengelolaan Air Irigasi											
6	Pengembangan Sumber Air	Unit	950	76,86	2.567	98,62	1.644	97,80	297	99,00	202	72,14
7	Pengembangan Jaringan Irigasi	Ha	94.087	91,73	237.784	93,22	523.530	99,80	542.807	98,69	120.085	24,02
8	Pembangunan Embung / Dam Parit	Paket	202	78,91	3.157	100	1.553	99,17	415	98,57	8.846	92,15
9	Pengembangan Kelembagaan P3A	Paket	139	99,29	673	102,59	297	99,00	720	95,87	-	-

Dari sisi regulasi, upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam implementasinya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk memantapkan upaya pelaksanaan

undang-undang di atas selama lima tahun terakhir sudah berhasil diterbitkan berbagai peraturan dan ketentuan lanjutan, diantaranya dengan terbitnya turunan Undang-Undang Nomor 41 / 2009, yaitu PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Permentan Nomor 79/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan, Permentan Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Permentan Nomor81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sementara itu dalam mendukung sertifikasi lahan, agar petani mendapat kepastian hukum terhadap lahan yang diusahakannya serta dapat membantunya untuk mengakses fasilitas pembiayaan seperti bank, juga diinisiasi dalam bentuk program pra dan pasca sertifikasi lahan. Selama tahun 2011 dan 2012 telah berhasil dilaksanakan pada 32.000 dan 72.300 persil lahan. Namun pada tahun 2013 jumlah itu berkurang menjadi hanya 697 persil lahan.

Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan Indeks Pertanamannya. Selama tahun 2011-2013 telah berhasil dilaksanakan upaya optimalisasi seluas 474.707 hektar dengan pencapaian target kegiatan lebih dari 90 %. Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan dilaksanakan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan *System of Rice Intensification* (SRI). Selama 2011-2013 luas areal yang berhasil dikembangkan melalui pendekatan SRI meningkat dari 10.440 hektar menjadi 205.450 hektar dengan realisasi

program di atas 93 %. Pengembangan jalan pertanian pada tahun 2011 berhasil dilaksanakan sepanjang 1.564 kilometer, sementara itu pada tahun 2012 dan 2013 panjang jalan usahatani yang dilaksanakan hanya sekitar 447 dan 304 kilo meter.

Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan melalui pengembangan sumberdaya air, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan embung dan dam parit serta pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selama tahun 2011-2012 telah dilakukan pengembangan sumberdaya air sebanyak 2.567 dan 1,644 unit, namun selama tahun 2013 hanya dikembangkan sebanyak 432 unit.

Dalam pengembangan jaringan irigasi, selama tahun 2010-2014 alokasi anggarannya terbagi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Sejalan dengan semangat Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air bahwa pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Tabel Kondisi Jaringan Irigasi berdasarkan Kewenangan Penanganan di Indonesia Tahun 2012

Kondisi Jaringan	Kewenangan			Total (Ha)
	Pusat	Provinsi	Kab./Kota	
Jaringan Baik (Ha)	1.250.100	555.057	1.676.141	3.481.298
Jaringan Rusak (Ha)	1.064.900	868.165	1.815.820	3.748.885
Jumlah (Ha)	2.315.000	1.423.222	3.491.961	7.230.183

Sumber: Kementerian PU

Walaupun secara ketentuan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para petani/P3A, namun kenyataannya tidak semua petani/P3A mampu untuk memperbaikinya. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membantu untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,3 juta hektar. Rehabilitasi kualitas dan kuantitas jaringan irigasi seluas 1,34 juta hektar. Selain itu, PU melakukan pembangunan daerah irigasi dan rawa seluas 500 ribu hektar.

Perbaikan saluran irigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian selama tahun 2011-2013 seluas 1.264.053 hektar, realisasi program ini berkisar 91-99 %. Selain perbaikan saluran irigasi, dilakukan pengembangan embung dan dam parit yang meliputi 3.157 unit pada tahun 2011, dan 1.553 unit selama tahun 2012 dan 328 unit pada tahun 2013 dan sebanyak 9600 unit pada tahun 2014.

Pengembangan pengelolaan air di tingkat petani melalui P3A didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selama tahun 2011-2013 telah dilakukan pengembangan kelembagaan P3A sebanyak 1.595 unit.

b. Pupuk, Alsintan dan Pembiayaan

Kementerian Pertanian sebagai pelaku utama di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berperan penting di dalam: (1) penetapan alokasi kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi per tahunnya; (2) penetapan produsen pupuk bersubsidi (bersama kementerian BUMN) dan menilai kebenaran data/dokumen pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen; dan (3) penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk. Sementara itu, di dalam distribusi pupuk, Kementerian Perdagangan sangat berperan di dalam menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta melakukan pengawasan di dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2010-2013 adalah 87,85%. Persentase realisasi subsidi pupuk tertinggi sebesar 102,87% pada tahun 2012 sedangkan dan persentase realisasi terendah pada tahun 2010 sebesar 77,61%.

Beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang belum valid, di mana terdapat indikasi penggelembungan (*mark-up*) luas lahan dan jumlah petani. Pada aspek penyaluran/distribusi, penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO (*Delivery order*), keterlambatan distribusi,

kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat provinsi maupun kabupaten belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka dinilai tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.

Tabel Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

		(Rp Juta)				
1	PSO1)	14.750.662	15.562.534	13.958.484	15.828.706	18.047.250
2	BLP2)	1.610.000	405.000	405.000		
3	Pengawasan	-	-	-		
	Jumlah	16.360.662	15.967.534	14.363.484	15.828.706	18.047.250

Keterangan: 1) PSO = Public Service Obligation. PSO merupakan tugas layanan publik yang dilaksanakan oleh BUMN. 2) BLP = Bantuan Langsung Pupuk.

Tabel Perkembangan Realisasi Subsidi Pupuk 2010-2014

Tahun	Volume (Ton)		
	Alokasi	Realisasi	%
2010	9.480.749	7.358.000	77,61
2011	9.733.224	8.397.134	86,27
2012	10.528.920	8.913.290	84,66
2013	8.611.050	8.858.365	102,87
2014 *	7.778.000	3.906.018	50,22

*Ket: *) Realisasi penyaluran s/d Mei 2014*

Berbagai upaya telah dikembangkan Kementerian Pertanian untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pupuk. Untuk peredaran pupuk, dengan pengembangan sistem penyaluran tertutup terus diupayakan perbaikan dalam distribusi. Terkait dengan bentuk subsidi kepada petani, selama tahun 2010-2011 telah dilakukan pengkajian yang komprehensif terhadap pemberian subsidi pupuk. Uji coba pemberian subsidi langsung kepada petani sebagai pengganti subsidi kepada pabrik pupuk belum sepenuhnya berhasil dengan baik, sehingga subsidi kepada pabrikan terus dilakukan.

Pengembangan alat dan mesin pertanian dikembangkan melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Pengembangan dengan pendekatan UPJA ini diharapkan akan membantu peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat. Selama tahun 2011-2013 telah dikembangkan UPJA mandiri sebanyak 7.133, dimana pada tahun 2011 dikembangkan sebanyak 7.023 paket UPJA mandiri dan tahun 2012 sebanyak 100 paket dan tahun 2013 sebanyak 10 paket. Sementara itu Kementan juga menyalurkan alat dan mesin pertanian kepada beberapa kelompok masyarakat. Selama tahun 2011-2013 telah disalurkan sebanyak 9.794 alat dan mesin pertanian. Penyaluran ini lebih berfungsi sebagai stimulan untuk menggerakkan swadaya petani.

Dari sisi pembiayaan kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya, Kementerian Pertanian memfokuskan kegiatannya pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) serta penguatan Lembaga Kredit Mandiri Agribisnis (LKMA) yang pengembangannya sejalan dengan program PUAP. Pelaksanaan PUAP melanjutkan apa yang telah dirintis sejak lima tahun terakhir dan dilaksanakan di desa baru sehingga ditargetkan semua desa yang berbasis kegiatan pertanian telah dapat dilayani oleh PUAP. Sementara itu pengembangan LKMA diharapkan dapat membantu penyediaan sumber pembiayaan bagi petani dengan mudah dan murah. Selama tahun 2011-2013 telah dikembangkan kegiatan PUAP di 18.460 desa dari 19.300 yang ditargetkan. Gapoktan penerima PUAP diharapkan dapat berkembang dan pada tahun kedua gapoktan mendapat LKMA. Untuk periode 2011-2014 sudah dilatih 162 gapoktan untuk menjadi LKMA.

Inisiatif lainnya dalam membantu pembiayaan usahatani adalah melalui subsidi bunga kredit melalui berbagai program. Selain itu diupayakan menyambungkan petani dengan beragam sumber pembiayaan lainnya seperti dana tanggung jawab sosial BUMN dan perusahaan swasta. Untuk melindungi petani dari kegagalan usaha juga telah diinisiasi pengembangan asuransi pertanian, yang dalam tiga tahun terakhir telah dilakukan dalam bentuk *pilot project* di berbagai lokasi.

c. Perbenihan

Sasaran strategis kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan adalah meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu yang

diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai. Fokus utama kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan pada tahun 2013 antara lain pemberdayaan penangkar benih padi dan kedelai, perbanyakan benih sumber (BS-BD, BD-BP) tanaman pangan, pengawasan dan sertifikasi benih, dan optimalisasi/revitalisasi Unit Prosesing Benih (UPB).

Realisasi kegiatan pemberdayaan penangkar benih padi pada tahun 2013 seluas 10.257 ha dan pemberdayaan penangkar benih kedelai seluas 3.014 ha. Kegiatan perbanyakan benih sumber terealisasi seluas 564,80 ha, sedangkan pengawasan dan sertifikasi benih mencapai 144.196,12 ha (luas penangkaran) dan 249.578,20 ton (produksi benih). Optimalisasi/revitalisasi UPB telah teralisasi sebanyak 10 unit.

Tabel Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2010	2011	2012	2013	2014*
Pemberdayaan Penangkar Benih	Ha					
- Padi	Ha			9.027	10.257	
- Jagung	Ha			571	-	
- Kedelai	Ha			2.332	3.014	
Perbanyakan Benih Sumber (BS-BD, BD-BP)	Ha	220,95	367,60	489,50	564,80	110,00
Pengawasan dan Sertifikasi Benih						
- Luas Penangkaran	Ha	161.004,61	156.795,83	178.899,34	144.196,12	48.054,66
- Produksi Benih	Ton	310.414,08	348.997,48	359.909,87	249.578,20	54.669,26
Realisasi/Optimalisasi UPB	Unit			11	10	

Ket: tahun 2014 data sementara

Disamping itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga mengelola anggaran subsidi benih, yang bertujuan menyediakan benih unggul bermutu untuk menunjang kegiatan SL-PTT padi, jagung dan kedelai yang disediakan oleh PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani.

Realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi untuk benih padi inbrida tahun 2013 mencapai 46.987 ton atau setara dengan 1.879.484 ha. Realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi untuk benih padi hibrida tahun 2013 sebanyak 1.810 ton atau setara dengan 120.676 ha. Realisasi

penyaluran/ penjualan benih bersubsidi untuk benih jagung komposit tahun 2013 sebanyak 365 ton atau setara dengan 14.593 ha. Realisasi penyaluran/ penjualan benih bersubsidi untuk benih jagung hibrida tahun 2013 sebanyak 598 ton atau setara dengan 39.922 ha dan realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi untuk benih kedelai tahun 2013 sebanyak 2.426 ton atau setara 60.640 ha.

Tabel Realisasi Penyaluran BLBU 2010-2012 dan Benih Bersubsidi Tahun 2013

No.	Komoditas	[illegible]			[illegible]	
		2010	2011	2012	(Ton)	(Ha)
1	Padi Inbrida	63.475	69.203	57.247	46.987	1.879.484
2	Padi Hibrida	6.439	5.814	2.777	1.810	120.676
3	Padi Lahan Kering	6.985	12.175	10.695		
3	Jagung Komposit				365	14.593
4	Jagung Hibrida	13.904	7.626	3.870	598	39.922
5	Kedelai	20.408	12.000	12.037	2.426	60.640
6	Kacang Tanah	7.356				
	Jumlah	118.567	106.818	86.626	52.186	2.115.315

Untuk sub-sektor hortikultura, selama ini kebutuhan benih untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura dipenuhi dari produksi dalam negeri (Balai Benih Hortikultura, penangkar benih, produsen benih swasta) dan pemasukan benih dari luar negeri. Pemasukan benih dari luar negeri dilakukan karena produksi benih dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, keterbatasan ketersediaan varietas atau yang benihnya tidak dapat atau belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Kelembagaan perbenihan adalah lembaga yang mendukung pengembangan perbenihan baik itu dari segi manajemen maupun sebagai praktisi penyedia benihnya antara lain adalah: Balai Benih Hortikultura (BBH), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), penangkar, produsen dan pedagang benih hortikultura. Dinas di provinsi yang menangani perbenihan hortikultura berperan dalam pembinaan penangkar dan menciptakan penangkar baru yang ada di wilayah tugasnya.

Penataan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan hortikultura akan berdampak terhadap perwujudan industri perbenihan untuk menghasilkan

benih bermutu dari varietas unggul secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pengelolaan atau penataan komponen-komponen prasarana dan sarana pendukung secara harmonis. Komponen-komponen dimaksud meliputi seluruh unsur yang tergabung dalam sistem perbenihan yang mencakup kegiatan pemuliaan dan pengembangan varietas, produksi dan prosesing benih, penyimpanan, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, distribusi dan pemasaran, promosi dan sosialisasi penggunaan benih bermutu kepada petani/konsumen.

Secara umum, kondisi kelembagaan perbenihan yang ada sekarang belum dapat dikategorikan sebagai lembaga industri perbenihan yang ideal dan membutuhkan suatu penanganan khusus agar mampu beroperasi secara profesional, baik yang dikelola oleh perorangan, usaha kelompok, maupun kelembagaan perbenihan pemerintah.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan sistem perbenihan hortikultura antara lain : a) terbatasnya varietas yang diminati dan selera pasar yang cepat berubah; perubahan permintaan pasar yang sangat cepat menyebabkan sering terjadinya pelaku usaha tanaman mendatangkan benih dari luar negeri yang jenis maupun varietasnya disukai masyarakat; b) lemahnya penguasaan teknologi produksi; khususnya petani/penangkar benih yang memproduksi benih untuk kebutuhan sendiri belum menguasai teknologi yang spesifik bagi masing-masing jenis tanaman, c) terbatasnya sarana produksi benih; d) lemahnya permodalan penangkar benih, dan e) keterbatasan kemampuan dan petugas perbenihan yang mengelola sistem informasi manajemen perbenihan, sehingga informasi/data tidak dapat tersedia setiap saat, serta f) belum optimalnya *software* perbenihan hortikultura serta keterbatasan *hardware* perbenihan hortikultura, baik di BBH, BPSBTPH maupun gapoktan/kelompok tani.

Tabel Capaian Kinerja Kegiatan Perbenihan Hortikultura

Tahun 2013

NO	KEGIATAN					ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Ketersediaan Benih Tanaman Sayur	Kg	814.169	773.461	95,00	6.871.239	6.507.352	94,70
2	Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura	Benih	8.864.640	8.071.255	91,05	3.683.915	3.341.645	90,71

		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3	Ketersediaan Benih Tanaman Obat	Kg	38.218	37.721	98,70	981.547	870.999	88,74
4	Ketersediaan Benih Tanaman Buah	Batang	1.198.845	1.122.119	93,60	10.828.607	9.950.634	91,89
5	Penguatan Kelembagaan	Lembaga	199	191	95,98	24.664.341	23.606.598	95,71
6	Pembinaan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih	Kali	432	402	93,06	12.485.810	11.604.397	92,94
7	Pemasyarakatan Benih Bermutu	Kali	2.182	1.920	87,99	48.057.837	42.377.999	88,18
8	Sarana Prasarana	Unit	120	115	95,83	6.755.737	6.463.891	95,68
9	Pedoman-pedoman	Judul	16	15	93,75	1.117.508	1.059.818	94,84
10	Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Buah Bermutu	Provinsi	31	31	100	1.420.400	1.399.450	98,53
11	Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Sayur dan Obat Bermutu	Provinsi	18	18	100	1.579.050	1.542.330	97,67
12	Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Florikultura Bermutu	Provinsi	17	17	100	1.522.278	1.491.482	97,98
13	Pembinaan Pengawasan Mutu Benih	Provinsi	33	33	100	1.172.082	1.137.295	97,03
14	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100	5.677.249	5.332.074	93,92
15	Kendaraan Bermotor	Unit	1	1	100	200.000	170.085	85,04

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

Beberapa solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain a) pertemuan koordinasi antar pusat, daerah dan instansi terkait (Dinas Provinsi, BPSBTPH, BBH) yang menangani perbenihan sangat dibutuhkan dalam rangka penyediaan benih sesuai kebutuhan benih dalam pengembangan kawasan, b) pembinaan penangkar-penangkar benih buah terutama di daerah luar Jawa masih sangat diperlukan, dalam rangka antisipasi jumlah SDM yang masih terbatas dan peningkatan penerapan teknologi produksi benih, c) distribusi Benih sumber tanaman buah sangat diperlukan guna merangsang penumbuhan penangkar benih tanaman buah di daerah dan mengoptimalkan peran Balai Benih Hortikultura di berbagai daerah terutama Balai Benih Hortkutura di luar Jawa dalam penyediaan sumber mata tempel untuk perbanyakan benih berikutnya serta sebagai pohon koleksi, d) meningkatkan pemanfaatan kegiatan pengembangan perbenihan dalam mendukung penyediaan benih hortikultura bermutu seperti pemberdayaan kelembagaan perbenihan, perbaikan sistim informasi

supply/demand benih, fasilitasi akses modal untuk mendukung pengembangan perbenihan, penumbuhan penangkar di sentra-sentra produksi, pemberdayaan *stakeholder* perbenihan untuk menciptakan varietas yang berdaya saing dengan teknologi produksi dan pilot proyek penangkaran benih bermutu.

Untuk sub-sektor peternakan, kegiatan perbenihan sub-sektor peternakan yang utama adalah menghasilkan benih ternak berupa semen beku sapi dan embrio sapi serta bibit hijauan makanan ternak unggul yang didistribusikan ke masyarakat. Sedangkan kegiatan perbibitan ternak seperti menghasilkan bibit ternak unggul dan tatakelolanya dilakukan oleh 10 (sepuluh) UPT perbibitan yang berada di seluruh Indonesia.

Produksi semen beku dilakukan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Jawa Timur dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Jawa Barat. Sedangkan produksi embrio dilakukan oleh Balai Embrio Transfer (BET) Cipelang Jawa Barat. Kinerja kedua produksi benih ternak sangat baik karena realisasi setiap tahunnya melebihi 100%.

Namun demikian, ada kegiatan penting yang berhubungan dengan perbenihan di sub-sektor peternakan yaitu uji zuriat, uji performans, dan pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan. Kegiatan uji zuriat dilakukan untuk menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi agroklimat di Indonesia dalam upaya mengurangi ketergantungan pada pejantan impor. Sedangkan uji performans dilakukan untuk menghasilkan bibit, khususnya pejantan dengan meningkatkan produktivitas melalui pendekatan faktor genetik.

Sementara untuk menjaga dan melestarikan serta upaya pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan telah dilakukan penetapan Wilayah Sumber Bibit pada tahun 2013 yaitu wilayah sumber bibit Itik Alabio (Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan) dan wilayah sumber bibit sapi Bali (Kabupaten Barru-Sulawesi Selatan). Selanjutnya akan menyusul wilayah sumber bibit dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sapi SO, Kuda Sandel Wood), Kabupaten Kebumen (sapi PO), Blora (Sapi PO), Rembang (Sapi PO), Banyumas (Kambing PE), Banjarnegara (Kambing PE, Domba Batur) dan Ciamis (Ayam Sentul).

Untuk sub-sektor perkebunan, telah dibangun sistem usaha perbenihan yang berbentuk kelembagaan usaha perbenihan baik berupa Usaha Pembenih Besar (UPB) maupun Usaha Pembenih Kecil (UPK) yang memproduksi benih berupa biji/kecambah/stek maupun benih siap salur. Produksi benih ini merupakan benih yang berkualitas. Untuk menjamin kualitas sumber benih perkebunan, secara operasional dilalukan oleh tiga Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat) untuk mengawasi dan menguji mutu benih di seluruh Indonesia.

Kinerja pembangunan industri perbenihan perkebunan selama periode 2009-2013 sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya peran swasta maupun masyarakat dalam mengembangkan usaha perbenihan perkebunan, namun demikian peran pemerintah baik pusat maupun daerah masih diperlukan dalam menfasilitasi pengembangan usaha perbenihan bagi komoditas perkebunan yang kurang diminati oleh swasta. Untuk itu, sejak lima tahun terakhir Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka merevitalisasi perbenihan perkebunan antara lain berupa pembangunan kebun sumber bahan tanaman (kebun induk, kebun entres, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih dan kebun penangkaran) dan pemeliharaannya serta penguatan kelembagaan perbenihan.

5. Pembangunan pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian. Dalam periode 2010-2014 telah dilakukan fasilitasi pengolahan diantaranya (1) revitalisasi penggilingan padi sebanyak 1.373 unit, (2) pengolahan tepung berbasis bahan baku lokal sebanyak 196 unit yang menghasilkan tepung cassava, tapioka, sagu dan ubi jalar, (3) pengolahan Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) Bersih menjadi lateks segar, *sit angin, sit asap, slab,* dan *lump* sebanyak 186 unit, (4) pengolahan kakao menjadi kakao fermentasi (5) pengolahan kelapa menjadi Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng, ataupun produk sampingnya seperti *nata de coco,* asap cair, sabut dan arang aktif/briket sekitar 110 unit, dan (6) pengolahan susu 110 unit untuk diolah menjadi susu *pasteurisasi, yoghurt,* keju, es krim, kerupuk susu, *steak* susu, sabun susu, permen/ karamel susu dan dodol susu.

Dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian, maka beberapa langkah yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Selama tahun 2010-2013, Kementerian Pertanian telah menerbitkan sebanyak 88 Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor pertanian. Penerapan SNI masih bersifat sukarela (*voluntary*) namun bisa menjadi wajib bila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Saat ini komoditi atau produk pertanian yang telah berstatus SNI secara wajib adalah gula kristal mentah dan gula kristal putih.
b. Untuk mendukung pengembangan mutu dan standarisasi bidang pertanian diperlukan juga kerjasama dan harmonisasi standarisasi, baik bilateral maupun regional. Harmonisasi dan kerjasama yang telah dilakukan antara lain: (a) kerjasama *Trade Support Program (TSP II) yaitu kerjasama teknis Indonesia dengan Uni Eropa* dengan tujuan mendorong *Export Quality* Infrastructure (EQI), (b) harmonisasi standar dan regulasi teknis bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar dan regulasi internasional maupun persyaratan mitra dagang, dilaksanakan melalui partisipasi aktif Indonesia di forum regional ASEAN dan APEC serta forum internasional yaitu *Codex Alimentarius* dan ISO. Harmonisasi standar di tingkat ASEAN utamanya untuk menyiapkan produk pertanian memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.
c. Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan (SJMKP) terbagi dalam: (a) organik, dimana selama periode 2009-2014 telah dilakukan pembinaan sistem pertanian organik 246 pelaku usaha/poktan/ gapoktan dan sertifikasi organik kepada 105 pelaku usaha/poktan/ gapoktan. (b) pembinaan penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan kepada 90 pelaku usaha/poktan/gapoktan.
d. Pengawasan jaminan mutu di rantai produksi dan distribusi (unit kebun, rumah kemas di gapoktan dan eksportir)
e. Sertifikasi dan pengujian alsintan.
f. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Practices Good Manufacturing Practices* (GMP)
g. Mengembangkan produk pertanian ramah lingkungan melalui Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO),* dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).

h. Meningkatkan keamanan pangan melalui kewenangan Kementerian Pertanian yang diamanatkan dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan, Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Infrastruktur mutu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah (OKKP-P/OKKP-D), Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) dan Laboratorium Penguji.

Membangun jejaring pasar

Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam membangun jejaring pasar diantaranya adalah

a). Meningkatkan akses petani terhadap pasar. Hal-hal tersebut antara lain kebijakan harga dan tataniaga bagi komoditas strategis, pengembangan pasar dan promosi komoditas unggulan yang prospektif, penyediaan sarana dan pengembangan kelembagaan pasar, pengembangan kerjasama dan kemitraan, dukungan analisis dan informasi pasar yang memberikan nilai tambah bagi pelaku yang berbasis pada teknologi informasi yang semakin maju.

b). Mengembangkan jejaring pasar domestik, melalui pengembangan sarana dan kelembagaan pasar yaitu: sub terminal agribisnis, pasar tani, pasar ternak, unit pemasaran poktan gapoktan, dan pasar lelang. Selain itu dilakukan pemantauan dan stabilisasi harga, advokasi dan penguatan akses pasar domestik dan pelayanan informasi pasar.

c). Pengembangan Informasi Pasar (PIP) melalui sistem informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu dan up to date merupakan instrumen yang vital serta memegang peranan yang amat penting bagi para pelaku agribisnis.

d). Promosi dalam negeri, melalui pameran pada umumnya diikuti juga dengan berbagai kegiatan lainnya seperti *talkshow*, temu bisnis (*buyer meet seller*) dan sosialisasi manfaat produk.

e). Mengembangkan jejaring pasar internasional, dimaksudkan untuk melakukan percepatan pertumbuhan nilai ekspor, memperlambat laju impor baik dalam bentuk segar maupun olahan sehingga mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan produk pertanian antara lain melalui kebijakan pencitraan produk yang lebih baik, meningkatkan

akses pasar dan perlindungan produk dalam negeri dari dampak persaingan global.

B. Pembangunan Sistem Inovasi

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian yang telah berhasil dicapai Kementerian Pertanian selama ini. Beberapa hasil inovasi meliputi penciptaan varietas unggul baru, teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan. Sub Sistem Inovasi Perbenihan Nasional telah menghasilkan beragam varietas baru terutama padi. Akan tetapi berbagai varietas unggul baru tersebut (Inpari , Inpago, Inpara, dan Hibrida) masih belum menggeser sepenuhnya keberadaan varietas unggul lama, karena belum optimalnya fungsi diseminasi dan sistem perbenihan nasional.

Sementara sub-sistem Inovasi Produksi Berkelanjutan telah menghasilkan berbagai output, terutama teknologi perbaikan sistem usahatani, seperti penyempurnaan teknologi jarak tanam melalui sistem Jajar Legowo (Jarwo), dan berbagai inovasi lainnya. Output unggulan tersebut didukung hasil-hasil analisis dan kajian inovasi logistik dan distribusi sarana produksi. Pada subsistem inovasi pascapanen dan pengolahan hasil, berbagai output telah dihasilkan dengan memanfaatkan *advanced technology* seperti *nano technology* dalam inovasi pengemasan produk pertanian, serta teknologi pengolahan hasil produk pertanian. Dalam bidang Inovasi Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumberdaya Pertanian telah berhasil dikembangkan model Akselerasi Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan Lestari (m-AP2RL) didukung analisis sistem dinamik.

Inovasi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian adalah pedoman identifikasi dampak dan arahan antisipasi, adaptasi serta mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian; *roadmap* strategi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim; serta output berupa Sistem Informasi Katam Terpadu yang berfungsi sebagai alat dalam pengamanan produksi dan pencapaian program peningkatan produksi beras untuk surplus 10 juta ton. Berbagai teknologi pengelolaan sumberdaya lahan yang telah dihasilkan yaitu teknologi sistem pertanian terpadu lahan kering iklim kering; teknologi pengelolaan tanah, air dan pupuk untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman; teknologi pengelolaan lahan suboptimal melalui penerapan pengelolaan hara terpadu

dan konservasi tanah; teknologi pemberdayaan agens hayati tanah untuk pemulihan kesuburan tanah terdegradasi; teknologi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pengelolaan tanaman terpadu; teknologi optimalisasi pemanfaatan lahan rawa; berbagai formula pupuk organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah; serta berbagai *tools/kit* seperti perangkat uji hara tanaman tebu dan sawit, alat pengukur pH, *testkit* digital perangkat uji pupuk organik, perangkat uji tanah rawa, dan alat analisis residu pestisida. Inovasi kelembagaan serta inovasi koordinasi dan integrasi lintas sektor banyak dihasilkan melalui kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi di seluruh provinsi melalui Balai Pengkajian Teknologi (BPTP). Teknologi spesifik lokasi tersebut terutama diterapkan dalam pendampingan program strategis Kementerian Pertanian. Selain itu, output unggulan seperti Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL) telah berhasil meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, dan secara ekonomis mampu menekan pengeluaran rumah tangga masyarakat pedesaan, meningkatkan skor Pole Pangan Harapan (PPH) masyarakat, serta konservasi sumberdaya genetik lokal. Salah satu kegiatan yang secara signifikan mampu mengakselerasi pemasyarakatan inovasi pertanian spesifik lokasi adalah implementasi Sistim Diseminasi Multi Channel (SDMC), yang mampu mendekatkan inovasi pertanian ke pertanian lapangan yang produktif, antara lain didukung pengembangan Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian (LLIP). Hingga saat ini telah dikembangkan 12 LLIP pada lahan-lahan suboptimal, wilayah pesisir dan wilayah perbatasan pada sebagian provinsi di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, antara lain telah dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi dalam menentukan kebijakan revitalisasi lahan, revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi pembiayaan, dan revitalisasi kelembagaan petani, serta inovasi kebijakan terkait distribusi dan perdagangan produk pertanian.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 mencatat keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup: 49 varietas unggul baru padi, 27 varietas unggul baru jagung dan serealia, 114 varietas unggul baru tanaman hortikultura, 38 varietas unggul baru/klon tanaman perkebunan, serta 47

galur unggul ternak, 1222 inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian, 44 teknologi pascapanen hasil pertanian, 139 model kelembagaan dan rekomendasi kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Dalam hal diseminasi teknologi, Kementerian Pertanian dalam periode 2010-2014 mendiseminasi 1307 teknologi ke pengguna. Selain itu juga melakukan sejumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional dalam rangka dipenyebarluasan hasil penelitian secara luas. Selama tahun 2010-2014, ada sebanyak 453 inovasi Balitbangtan yang telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (HKI), dimana 294 diantaranya telah berupa sertifikat HKI.

C. Penyediaan Pangan Masyarakat

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKPG) tahun 2004 merekomendasikan kriteria kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk Indonesia yaitu kebutuhan kalori minimal 2.000 kkal perkapita/tahun, kebutuhan protein minimal 52 gram perkapita/tahun. Sementara itu, untuk ketersediaannya ditetapkan kriteria kecukupan minimal 2.200 kkal perkapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram perkapita/hari untuk protein.

Ketersediaan energi tidak menjadi masalah selama periode tahun 2010-2014, karena jauh di atas rekomendasi WKPG dengan rata-rata 3.767 kkal per kapita per hari, bahkan jumlahnya per tahun rata-rata mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 27 kkal per kapita per hari. Rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi tersebut menurun dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi pada periode tahun 2005-2009 yang mencapai 142 kkal per kapita per tahun. Hal ini diduga akibat ketidakselarasan pertumbuhan penyediaan pangan sumber energi dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pada sisi konsumsi energi, capaiannya masih 1.987 kkal per kapita per hari atau sedikit di bawah rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Selain itu pertumbuhan konsumsi tersebut menunjukkan pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 5 %. Hal ini diduga terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat. Namun demikian, apabila pertumbuhan konsumsi tersebut dibandingkan dengan periode tahun 2005-2009, sebenarnya terjadi pertumbuhan konsumsi yang positif dari yang sebelumnya minus 32 % menjadi minus 5 %.

Tabel Konsumsi Beras di Tingkat Rumah Tangga Tahun 2010-2014

Tahun			
2010	99,70	(2,52)	(2,47)
2011	101,70	2,00	2,01
2012	96,6	(5,10)	(5,01)
2013	96,3	(0,30)	(0,31)
2014			
Rata-rata 2010-2014	98,57	(1,48)	(1,45)
Rata-rata 2005-2009	103,25	(0,75)	(0,66)
Sasaran			(1,5)

**) konsumsi beras pada tingkat rumah tangga*
Sumber : Susenas BPS Tahun 2010 – 2013, diolah dan dijustifikasi BKP, Kementan

Kinerja kecukupan pangan dari aspek ketersediaan protein mencapai 93,10 gram per kapita per hari atau jauh diatas rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, dengan rata – rata persentase peningkatan sebesar 0,53 %. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan protein pada periode tahun 2005-2009 yang mencapai 3,11 gram per kapita per tahun, maka rata-rata pertumbuhan ketersediaan protein tersebut mengalami penurunan. Hal ini diduga akibat ketidakselarasan pertumbuhan penyediaan pangan sumber protein dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel Pola Pangan Harapan Tahun 2010 – 2014

TAHUN		
2010	85,70	
2011	85,60	(0,1)
2012	83,50	(2,1)
2013	81,40	(2,1)

2014		
Rata-rata 2010 – 2014	84,93	1,42
Rata-rata 2005 – 2009	79,50	(0,07)
Sasaran 2013	91,50	

Seperti halnya ketersediaan protein, konsumsi protein jauh diatas rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu mencapai 57,14 gram/kapita/hari. Pertumbuhannya juga meningkat rata-rata sebesar 0,71%/tahun, termasuk apabila dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi protein pada periode 2005-2009 yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Peningkatan pertumbuhan konsumsi protein diduga berkaitan dengan peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Rata-rata konsumsi beras pada periode tahun 2010–2014 sebesar 98,57 kg/kapita/tahun (Tabel 31) dengan laju pertumbuhan konsumsi menunjukkan penurunan 1,48 % per tahun. Perkembangan konsumsi beras pada periode tahun 2010–2014 dibandingkan dengan periode tahun 2005–2009 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh mulai ditetapkannya kebijakan diversifikasi pangan melalui berbagai promosi seperti *One Day No Rice* dan pengembangan konsumsi pangan pokok lokal. Namun, penurunan konsumsi beras ini juga perlu diwaspadai mengingat data Susenas yang dilakukan oleh BPS menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan konsumsi terigu.

Tabel Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2009-2013

(Rp/Kg)

	Umum	Ter-murah									
2009	6.595	5.477	25.779	59.544	11.025	8.575	7.639	8.408	13.041	26.905	14.542
2010	8.011	6.430	23.897	62.993	12.029	10.090	7.501	8.702	13.471	23.299	16.852
2011	9.341	7.412	23.966	67.077	14.246	10.147	7.538	8.628	15.008	23.763	19.224
2012	10.425	8.281	26.177	76.692	12.956	11.358	7.507	8.843	16.133	24.034	14.651
2013	10.857	8.587	29.841	92.843	13.232	11.874	7.597	9.604	17.676	33.853	36.318
Rata – Rata CV	1,92	2,01	5,77	3,42	2,90	4,12	0,52	2,34	4,38	23,87	16,77
Target CV	<=5	<=5	<=10	<=10	<=5	<=5	<=10	<=10	<=10	<=25	<=25

Untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, aktif dan produktif, masyarakat harus mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Para ahli gizi menyarankan kriteria pola pangan yang ideal bagi manusia Indonesia yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100. Konsumsi pangan ideal adalah jika proporsi jumlah asupan karbohidrat dari serealia (termasuk gandum) maksimum 50 %.

Target skor PPH Indonesia pada tahun 2015 sesuai dengan Perpres 22 tahun 2009 sebesar 95. Perkembangan skor PPH pada periode 2010–2014 menunjukkan peningkatan skor PPH sebesar 1,42 per tahun, dengan capaian skor PPH pada tahun 2013 sebesar 81,4. Ini menujukkan bahwa capaian diversifikasi konsumsi pangan masyarakat belum mencapai sasaran yang diharapkan (PPH = 91,5 pada tahun 2013). Belum tercapainya sasaran tersebut diduga akibat tingginya konsumsi padi–padian, minyak, dan lemak. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya konsumsi sayur–buah, umbi–umbian, pangan hewani, dan kacang - kacangan.

Stabilitas harga pangan pokok merupakan salah satu indikator ketahanan pangan tahun 2010-2014 yang dicirikan dengan koefisien variasi (CV) tidak melebihi target CV masing-masing komoditas. Selama periode tahun 2010-2014, perkembangan harga pangan pokok secara umum stabil dengan CV tidak melebihi target. Pangan pokok tersebut meliputi komoditas beras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng curah, gula, terigu, kedelai, dan telur ayam. Hal ini menunjukkan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen, meskipun harga–harga tersebut stabil pada kisaran harga yang cukup tinggi.

Namun demikian untuk komoditas cabe merah dan bawang merah cenderung mengalami gejolak harga yang ditunjukkan dengan CV lebih besar dari 10 %. Gejolak ini diakibatkan oleh keterbatasan pasokan barang karena perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakibatkan sejumlah sentra produksi mengalami kegagalan panen.

D. Perlindungan Produk Pertanian Melalui Perkarantinaan

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaan dengan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas operasional di

lapangan. Upaya perlindungan produk pertanian sebagai wujud dari Empat Target Sukses Kementerian Pertanian, yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan khusus untuk padi, jagung serta daging sapi ditunjukkan dari kemampuan melakukan cegah tangkal terhadap hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Sebagai tindak lanjut dari temuan OPTK maka dilakukan tindakan karantina pemusnahan dengan cara pembakaran produk tumbuhan yang terinfestasi, karena tindakan perlakuan tidak memungkinkan efektif dilaksanakan.

Dalam kurun waktu 2010-2014 Badan Karantina Pertanian juga telah melakukan cegah tangkal terhadap HPHK berbahaya apalagi yang bersifat zoonosis, antara lain: penyakit *John's Disease* (*Paratuberculosis*), *Bovine Spongiform Encephalophaty* (BSE), *Infectious Bovine Rhinotracheitis* (IBR), *Enzootic Bovine Leukosis* (EBL), B*ovine Viral Diarrhea* (BVD), *Leptospira, Brucellosis,* baik dalam kegiatan impor maupun antara area (domestik).

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun. Implementasi Peraturan Perkarantinaan dan Keamanan Hayati memberikan pengaruh terhadap menurunkan volume importasi buah dan sayur buah segar antara lain adalah :

a. ieraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012;
b. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012.

Dalam Permentan tersebut terdapat pengaturan pintu pemasukkan guna mengefektifkan tindakan cegah tangkal introduksi OPTK khususnya lalat buah. Pengaturan pintu pemasukan sekaligus selaras dengan ketentuan World Trade Organization - Sanitary and Phitosanitary (WTO-SPS) yang tidak bertentangan untuk melarang perdagangan bebas khususnya buah asal luar negeri. Adanya penutupan pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok,

berimplikasi terhadap penurunan volume impor buah, sayur segar dan umbi lapis segar.

Perlindungan/proteksi produk tumbuhan juga senantiasa dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga terutama terhadap kesehatan tumbuhan untuk menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*Notification of Non-Compliance*) di negara tujuan.

Badan Karantina Pertanian untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian khususnya tumbuhan dilakukan melalui Skim Audit Badan Karantina Pertanian (SAB). SAB dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang merupakan tata alir proses registrasi melalui proses pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian kepada pelaksana tindakan karantina/perusahaan (pihak ketiga) yang akan diberi mandat untuk melaksanakan fumigasi standar, sertifikasi marking kemasan kayu.

Penyempurnaan penyelenggaran program registrasi terhadap perusahaan fumigasi dan perusahaan kemasan kayu dalam rangka penguatan kinerja pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penguatan kinerja tersebut dimaksudkan bahwa dalam Skim Audit Barantan telah menerapkan standar manajemen mutu. Oleh karena itu proses jaminan mutu baik oleh pihak otoritas kompeten (Badan Karantina Pertanian), maupun pelaksana tindakan karantina (pihak ketiga) dapat dipertanggungjawabkan.

E. Pertanian dalam Jasa Lingkungan

Pertanian menyumbangkan beberapa bentuk jasa lingkungan, antara lain mengatur tata air dan mengendalikan banjir pada suatu daerah aliran sungai (DAS), menjaga keberadaan sumberdaya air, mengendalikan erosi, mengendalikan longsor, mempertahankan suhu udara, mendaur-ulang limbah, menjaga kualitas (purifikasi) udara dan memitigasi perubahan iklim. Nilai dari masing-masing jasa lingkungan yang dapat dihasilkan oleh sektor pertanian ditentukan oleh sistem penggunaan dan pengelolaan lahan. Berbagai praktek pertanian bisa menghasilkan jasa lingkungan dan

multifungsi yang negatif (*negative externalities*), namun sistem pertanian yang dikelola secara berkelanjutan akan memberikan *positive externalities*. Sistem pertanian berbasis pohon, terutama sistem multistrata seperti *agroforestry*, cenderung memberikan berbagai jasa lingkungan yang positif. Sebaliknya sistem pertanian lahan kering berbasis tanaman semusim yang dikelola secara intensif di lahan berlereng curam, cenderung memberikan berbagai eksternalitas yang negatif. Sistem sawah memberikan berbagai jasa lingkungan terutama dalam hal mengatur tata air, menurunkan suhu udara mikro dan menurunkan bahaya erosi.

Ada dua pendekatan yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jasa lingkungan pertanian:

a. Pendekatan hukum, dimana pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan insentif praktek pertanian yang memberikan fungsi lingkungan positif dan disinsentif untuk praktek pertanian yang berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan. Pendekatan hukum juga diberlakukan terhadap sektor di luar pertanian yang aktivitasnya mengurangi atau menghilangkan kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan jasa lingkungan, seperti Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Insentif finansial dan bantuan teknis untuk mengembangkan sistem pertanian yang memberikan peningkatan nilai ekonomi dan sekaligus jasa lingkungan.

Kedua pendekatan ini pada umumnya ditempuh secara simultan. Mengingat sektor pertanian semakin dihadapkan kepada tantangan lokal dan global yang semakin serius, maka pemilihan inovasi teknologi diarahkan untuk sistem penggunaan dan pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan daya adaptabilitas dan ketangguhan (*resilience*) sistem tersebut dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan yang lebih tinggi.

F. Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pertanian

Indonesia memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Namun demikian, berbagai masalah dan tantangan masih dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut termasuk dalam lima tahun ke depan.

1. Potensi

a. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga, 12 % spesies mamalia, 16 % reptil dan amphibi, dan 17 % burung di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia hanya 13 % dari total luas daratan di dunia.

Potensi sumberhayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian besar lagi belum teridentifikasi. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersedian tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda. Kita bisa menjumpai padang es dan padang rumput dataran tinggi di Papua. Beragam hutan basah dataran rendah di Kalimantan dan Sumatera. Adapula ekosistem danau yang dalam dan rawa dangkal. Untuk itu, agar keanekaragaman hayati dan agoekosistem tidak terancam kelestariannya, maka kita harus arif (bijaksana) dalam memanfaatkannya, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan aspek kelestariannya.

b. Lahan Pertanian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian.

Berdasarakan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.

Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar 34,7 juta hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta hektar, HPK 6,79 juta hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan Produksi (HP).

Potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi, sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Potensi ini apabila dapat dmanfaatkan secara optimal merupakan peluang bangsa kita untuk menjadi lebih maju dan sejahtera.

Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara optimal seperti lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

c. Teknologi

Teknologi Pertanian Indonesia sendiri berkembang dengan pesat. Dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Banyak aplikasi teknologi yang digunakan dalam industri pertanian modern di Indonesia guna mengejar

hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah yang menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi, untuk mendorong sistem dan usaha pertanian yang efisien, dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal. Teknologi tersebut diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air seperti teknologi panen air, teknologi pemanfaatan air secara efisiensi melalui irigasi tetes, jaringan irigasi tingkat desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT).

Selain itu, Kementerian pertanian menghasilkan berbagai macam prototipe alat dan mesin pertanian yang bermanfaat bagi petani. Prototipe tersebut merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan perekayasaan alsintan, menghasilkan varietas baru, produk lainnya, seperti vaksin, bibit ternak, *tool kit*, peta, dan sebagainya. Teknologi pascapanen diyakini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas produk hasil panen Selain itu teknologi pengolahan juga diperlukan sehingga mampu memberikan nilai tambah dan kualitas dari suatu produk pertanian. Demikian pula teknologi yang terkait dengan pemasaran, misalnya teknologi pengemasan, penyimpanan, sortasi dan lainnya yang tentunya menjadi tantangan bagi lembaga penelitian untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif.

Berbagai macam paket teknologi tersebut diharapkan tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Bioteknologi dan teknologi untuk pertanian organik merupakan tulang punggung IPTEK yang belum optimal dikembangkan, perlu diperkuat sehingga menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Teknologi informasi yang dikembangkan membuka kesempatan dikembangkannya pertanian cermat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas biologis sistem pertanian baik dalam skala nasional, regional, perusahaan hingga usahatani. Hal ini dapat mendukung pengembangan bio-produk yang mempunyai nilai jual lebih baik.

d. Tenaga Kerja

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumahtangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Besarnya jumlah tenaga kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing. Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan keterampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitasi pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Sub-sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap bagian terbesar tenaga kerja dan sangat dominan dalam mewarnai struktur ketenagakerjaan sektor pertanian maupun nasional. Hampir seluruh penduduk di perdesaan bekerja di sub-sektor tanaman pangan.

Selain semakin meningkatnya kebutuhan terhadap produk pangan, juga posisi tanaman pangan saat ini masih dipandang sebagai komoditas strategis, politis, ekonomis sehingga dipandang perlu upaya peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan terutama petani terus akan menjadi prioritas, mengingat masih rendahnya kualitas SDM pertanian.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub-sektor tanaman pangan tersedia di pedesaan, namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja di sub-sektor pertanian. Jumlah rumah tangga yang berusaha di bidang pertanian selama satu dekade terakhir (2003-2013) diindikasikan menurun

sebanyak 5,096 juta RT dan sekitar 4,527 juta RT (89%) berada di Jawa. Sedangkan dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia, tenaga kerja ini masih sangat kurang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengupayakan secara berkelanjutan penyediaan SDM Pertanian yang berkualitas.

e. Pasar

Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 237 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49 persen per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk termasuk pertanian tanaman pangan di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, menurut data Mc Kinsey Global Institute, saat ini kelas menengah di Indonesia berjumlah 45 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 135 juta pada tahun 2030. Hal ini merupakan pasar yang harus kita antisipasi, mengingat ragam permintaannya terhadap produk pertanian semakin besar dan spesifik. Selain itu, akan semakin penting dengan ditetapkannya pasar tunggal ASEAN pada tahun akhir 2015, dimana pasar domestik akan dipenuhi oleh produk negara ASEAN bila tidak mampu menghasilkan produk yang diminta kelas menengah tersebut.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar

dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

Pada tahun 2015, kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN akan terealisasikan. Pilar utama dalam AEC adalah mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang didukung dengan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih bebas. Lebih bebas yang dimaksudkan adalah adanya pengurangan hambatan tarif maupun non tarif dalam perdagangan antar negara ASEAN. AEC akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar, mendorong daya saing serta berpotensi menyerap tenaga kerja Indonesia. Perwujudan AEC akan membentuk ASEAN sebagai pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India, Indonesia yang jumlah penduduknya 40 persen dari total jumlah penduduk kawasan menjadikan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang produktif dalam pasar ASEAN.

Penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Kondisi inilah yang cukup mengkhawatirkan karena berpengaruh pada eksistensi produk lokal, peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) memperluas jaringan pemasaran, serta 4) meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran. Selain itu, rasa nasionalisme Bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Bila perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, maka akan mampu memberikan peluang bagi industri manufaktur Indonesia untuk memasarkan produknya dan mampu bersaing dengan produk-produk impor baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

2. Permasalahan

Pembangunan periode 2010-2014 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2005 – 2009). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2015-2019, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

1). Konversi lahan yang tidak terkendali

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai *real estate*, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru.

Konversi lahan sawah sekitar 80 % terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan

perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

2). Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru

Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330 ribu hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

3). Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Pada tahun

1992 kurang lebih 18 juta hektar lahan di Indonesia telah mengalami degradasi atau penurunan kualitas lahan. Pada tahun 2002 luasan tersebut meningkat menjadi 38,6 juta hektar (BPS, 2002). Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan melalui memanfaatkan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan. Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati dapat membantu menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat.

4). Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

5). Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum,(2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

b. Beternak tidak mempunyai lahan

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain.

Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan.

3. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Selain itu, masih terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian,

laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantinaan, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik komoditas. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadai nya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses penganglatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi.Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum

sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.
Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan gula yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih/bibit unggul. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol.

Di Indonesia, sistem perbibitan ternak sudah mengalami kemajuan dalam hal peraturan pemerintah tetapi dalam pelaksanaanya masih belum optimal. Permasalahan pembibitan sapipotong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurasan betina produktif akibat pemotongan betina produktif;(5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

Sistem perbibitan nasional diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang

dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan. Dengan adanya kelembagaan ini maka peternakan rakyat hingga industri akan mendapatkan manfaatnya. Apabila program perbibitan dalam sebuah kelembagaan meningkat dampaknya peternakan dalam negeri akan meningkat juga sehingga mempunyai bibit yang memiliki kualitas sangat baik.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar.Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di pengusahaan perbenihan/perbibitan.Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi.Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri.Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

5. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya

yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan pertanian mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di bidang pertanian. Pengembangan pertanian memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan fiskal dan moneter. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Perubahan konstalasi pemerintahan dari sentralistik menuju otonomi daerah tidak serta merta dapat mengaktualisasikan peran kelembagaan petani dan penyuluhan di daerah. Upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah pasca reformasi dan otonomi daerah, namun belum dapat menunjukkan hasil yang benar-benar dapat memberikan jaminan berjalannya sistem budidaya dan penerapan teknologi untuk dapat mengakselerasi produksi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan. Penerapan ke empat strategi tersebut sampai di tingkat lapang masih terkendala beberapa aspek antara lain yang dirasakan sangat signifikan adalah pengawalan intensif dari aparat pertanian di daerah produksi (Dinas

Pertanian, Penyuluh, POPT, PBT dll) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana sebagian kewenangan bidang pertanian telah dilimpahkan kepada daerah, melalui PP Nomor 38 Tahun 2007. Hasil identifikasi dan pencermatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Program Nasional dalam rangka peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dan pengembangan komoditas pangan lainnya, tidak terkawal dengan baik di daerah, karena dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang pertanian kepada daerah sebagaimana tertuang dalam PP NO 38 TAHUN 2007, tidak serta merta mendapat prioritas dari Pimpinan Daerah, sehingga program dan kegiatan tidak terkawal dengan baik, sebagaimana kita alami pada masa Bimas yang lalu. Hal ini harus menjadi fokus Pemerintah saat ini dan ke depan.

Langkah strategis yang harus dilakukan saat ini dan kedepan adalah, dengan menggerakkan seluruh elemen di daerah melalui peran strategis Pemimpin Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, sampai ke tingkat Desa), sehingga Program peningkatan produksi Beras Nasional yang telah didukung dengan fasilitasi teknologi, sarpras produksi dan dukungan pembiayaan manajemen dapat menjadi suatu Gerakan Nasional dengan satu komando kebijakan untuk dapat mencapai dan mengawal peningkatan produksi beras nasional secara berkelanjutan "Menempatkan pangan sebagai bagian menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta rasa nasionalisme". Untuk mencapai hal tersebut dalam jangka pendek dan menengah peran Presiden secara sentral sangat penting dan dibutuhkan dalam menggerakkan Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajarannya mengawal program peningkatan produksi beras nasional. Forum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia); APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), serta pelibatan aktif dunia usaha secara berkeadilan. Hal ini akan sangat besar perannya dalam membangun integrasi dan sinergi program pembangunan pertanian. Dalam jangka panjang harus segera dirancang suatu regulasi yang mampu mengaktualisasikan pangan sebagai kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh komponen bangsa.

6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan

pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

a. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

Kelembagaan pasar yang dibangun selama ini, seperti kelembagaan pasar pada Pasar Lelang, Sub Terminal Agribisnis, Pasar Ternak, Pasar Tani (Aspartan, Asosiasi Pasar Tani) dan kelembagaan pada sistem resi gudang masih harus mendapatkan pengawalan dalam memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan posisi tawar petani yang optimal.

b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha indusri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

c. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang,sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib ke luar kota bahkanke luar negeri, bekerja di pabrik-pabrik, bidang kedokteran, menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan bergengsi lainnya. Selama ini rata-rata pekerja yang bekerja di sektor pertanian adalah penduduk dengan usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteaan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanianmenjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian adalah membangun pertanian lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan bioindustri pertanian menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan upaya tersebut. Jika kondisi tersebut dibangun di perdesaan, tentu akan menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat dan sangat menarik bagi generasi muda untuk tidak lagi pergi ke kota, bahkan generasi muda yang telah bekerja di perkotaan akan kembali ke perdesaan. Untuk itu beberapa hal penting harus dipersiapkan di perdesaan, yaitu (1) membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian di perdesaan, (2) meningkatkan kapasitas SDM generasi muda pertanian yang lebih baik, dan (3) mendorong kebijakan dan regulasi yang tepat terutama dalam kaitannya dengan kepastian mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan para generasi muda. Langkah konkrit untuk ini antara lain adalah menjaring seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya siswa baru di sekolah-sekolah tinggi pertanian lingkup Kementerian Pertanian, yang diikuti dengan perbaikan kurikulum dan revitalisasi sarana prasarana belajar mengajar termasuk SDM pengajar.

6. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi

perkebunan (KPEN-RP) , Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan *prudential* perbankan. Dampak dari penerapan *prudential* perbankan dirasakan petani seperti sulinya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosilaisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiyaan usahatani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiyaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplentasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengkases kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.

c. Tantangan Pembangunan Pertanian 2015-2019

1). Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi

Tantangan global di masa mendatang adalah bagaimana penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,5 milyar pada tahun 2050, dan apabila dikaitkan dengan adanya perubahan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara global akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya.

Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitment global. Untuk itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

Bahan bakar minyak (BMM) dan bahan bakar gas (BBG) yang berasal dari sumberdaya fosil merupakan hal yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan, yakni sebagai sumber energi penggerak utama transportasi, industri dan juga pertanian. Pasa saat ini bahan bakar berasal dari fosil jumlahnya semakin terbatas. Sejak dieksploitasi mulai abad 20an diperkirakan sumberdaya ini fosil semakin langka. Dengan terbatasnya ketersediaan energi dan fosil, maka harus dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian beberapa komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, jagung, ubikayu, tebu, kemiri sunan, jarak pagar dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila sumber energi dari hayati ini atau disebut Bahan Bakar Nabati (BBN) dapat dikembangkan dengan baik, maka ketergantungan terhadap BBM semakin kecil. Di sisi lain dengan berkembangnya permintaan

terhadap BBN maka akan memberikan peluang pasar baru bagi produk hasil pertanian para petani.

2). Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Sejak tahun 1898 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 % per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir(11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing

wilayah. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

Selain itu, Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah "rawan bencana". Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan macam bencana alam lainnya. Semua bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan untuk antisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pascabencana menjadi penting.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sering terdampak bencana alam paling besar. Bencana alam tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan bendung, dam, jaringan irigasi, jalan usahatani, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pangan. Naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam. Cuaca yang tidak menentu sering mengakibatkan petani sulit memperkirakan waktu untuk mengolah lahan dan memanen. Akibat perubahan iklim,tidak kurang dari 50 % wilayah pertanian di Indonesia menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju, sehingga musim tanam menjadi pendek. Kondisi ini akan sangat berdampak buruk terhadap intensitas tanam jika tidak ada terobosan inovasi dan teknologi yang mampu memecahkan masalah tersebut. Salah satu inovasi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian adalah varietas unggul berumur genjah dan sangat genjah serta inovasi teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman pendukungnya.

3). Kondisi Perekonomian Global

Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara *emerging economic* dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002.

Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 % di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 %; 19,4 %; dan 18,8 %.

Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu *emerging country* yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen, dibandingkan dengan Malaysia 5,4 persen, Thailand 5 persen,

Singapura 1,2 persen, Filipina 6,6 persen, dan Vietnam 5,7. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa sebagai pasar potensial dan tenaga kerja.

Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif. Dengan masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia akan berkesempatan mengenjot ekspor ke berbagai negara, di sisi lain bila tidak siap, dunia usaha lokal akan tergulung diterpa produk impor, masyarakat ekonomi ASEAN akan membuat pertukaran tenaga kerja, modal dan perdagangan berlangsung terbuka antar negara ASEAN. Dengan karakter seperti itu, persaingan tidak lagi semata-mata dalam konteks antar negara, tetapi juga antar daerah (region) dan bahkan antar individu.

Persaingan antar daerah atau antar kota tergambar dari pengukuran Global Cities Index 2012, yakni indikator untuk mengukur tingkat daya saing antar kota dengan variabel seperti aktivitas bisnis, Sumber Daya Manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya dan sumberdaya politik. Hasil dari survei tersebut setidaknya memberikan gambaran bagaimana daya saing satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hasil pengukuran index tahun 2012 menunjukan Singapura berada pada peringkat 11 dengan angka (3.20), Beijing 14 (3.05), Bangkok 43 (1.93), Kuala Lumpur 49 (1.55),Manila 51 (1.49), dan Jakarta 54 (1.30) dari 66 kota yang disurvei.

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 230,6 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,25 % per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan

pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

Krisis pangan dunia dimulai sejak tahun 2005 ketika negara-negara dunia mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan kenaikan harga pangan. Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam berkisar yaitu dari 75 % sampai 200 %. Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Krisis pangan dikhawatirkan terjadinya gejolak sosial dan politik bagi negara-negara yang mengalamikrisis pangan, seperti terjadi di Somalia pada awal Mei 2008. Mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi menganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Atas dasar situasi dan pertimbangan di atas, maka peningkatan produksi pangan menjadi jalan keluar mutlak yang tidak bisa ditawar. Pergerakan harga global berdampak terhadap pengeluaran konsumsi dan biaya hidup, terutama terhadap Negara berkembang yang cenderung pangsa pengeluaran pangan sangat besar. Kondisi ini harus diantisipasi, bila terjadi gejolak harga pangan kedelai akan mengganggu stabilitas, terutama produsen tahu tempe. Lonjakan harga daging juga meningkatkan inflasi, demikian halnya dengan gejolak harga bawang dan cabai.

4). Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019 dan 44 % penduduk berada di pedesaan dan 56 % diperkotaan. Sementara kapasitas ketersedian lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi.

Sementara itu, laju urbanisasi yang tinggi dimana generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus. Fenomena urbanisasi dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian perdesaan ke sektor industri ke perkotaan. Pada tahun 1990 persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan hanya sekitar 30,5 %, pada tahun 2010 meningkat menjadi 44,3 % dan diperkirakan pada tahun 2030 menjadi sebesar 53,7 %. Laju urbanisasi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri di perkotaan. Kondisi ini makin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agro industri di pedesaan.

5). Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan, yang jarak antar wilayah membutuhkan alat/sarana yang cukup dalam kelancaran distribusi pangan.

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana. Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

A. Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

"Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

makna dari Visi adalah :

- Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
- Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

B. Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi,
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian,
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani,
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi

Makna dari misi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Makna dari misi Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

Makna dari misi Mewujudkan Kesejahteraan Petani adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Makna dari misi Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi adalah meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi, yakni:

T.1. Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula,

T.2. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan,

T.3. Bergesernya budaya konsumsi pangan

T.4. Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga,

Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, yakni:

T.5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi,

T.6. Mendorong majunya agrobioindustri.

Mewujudkan Kesejahteraan Petani, yakni:

T.7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani.

Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi, yakni:

T.8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

D. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan kondisi yang inginkan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

S.1.1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula, dengan Indikator Kinerja :

- produksi padi
- produksi jagung
- produksi kedelai
- produksi tebu
- produksi Daging Sapi dan Kerbau
- rasio swasembada beras
- rasio swasembada jagung
- rasio swasembada kedelai
- rasio swasembada daging sapi dan kerbau
- rasio swasembada gula

S.2.2. Terjaminnya distribusi pangan, dengan Indikator Kinerja:

- produksi padi per kapita wilayah Sumatera
- rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa
- rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan
- rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi
- rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara
- rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua
- Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

S.2.3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi, dengan Indikator Kinerja:

- konsumsi Kalori perkapita
- konsumsi pangan hewani perkapita
- Skor Pola Pangan Harapan
- penurunan jumlah penduduk rawan pangan

S.3.4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal, dengan Indikator Kinerja:

- rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras

S.4.5. Stabilnya produksi cabai dan bawang merah, dengan Indikator Kinerja:

- Produksi cabai besar
- Produksi cabai rawit

- Produks Bawang Merah
- koefisien variasi produksi cabe besar
- koefisien variasi produksi cabe rawit
- koefisien variasi produksi bawang merah
- Koefisien variasi harga produk cabe
- Koefisien variasi harga produk bawang merah

S.5.6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing,

- produksi mangga
- produksi nenas
- produksi manggis
- produksi salak
- produksi kentang
- produksi jeruk siam/keprok
- produksi karet
- produksi kopi
- produksi kakao
- produksi lada
- produksi pala
- produksi cengkeh
- produksi kelapa
- produksi teh
- produksi susu
- produksi daging kambing dan domba
- produksi daging babi
- rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis
- penurunan volume impor produk pertanian strategis

S.6.7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi,

- produksi kelapa sawit
- produksi komoditas ubi kayu

S.7.8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani,

- jumlah petani yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan
- jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

S.7.9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani,

- PDB pertanian sempit/jumlah TK pertanian
- Persentase petani miskin

S.8.10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian,

- Nilai reformasi birokrasi
- Nilai layanan perkarantinaan
- Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna

S.8.11. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian,

- Opini Laporan Keuangan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Visi pembangunan yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas yang terkait langsung dengan bidang pertanian yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

1. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
2. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan

3. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
3. Pengembangan agroindustri perdesaan,
4. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
4. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
5. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
6. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
7. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
2. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
3. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Empat Kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut :

1. melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian
2. Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan.
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional
4. memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian,

Berdasarkan keempat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, dilaksanakan dengan strategi:

a. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, dalam lima tahun mendatang akan dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Audit Lahan. Membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui inventarisasi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik yang terintegrasi dengan data identitas petani.
2) Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah dan Perda. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan

pertanian. Selain itu diharapkan mendapat dukungan kesesuaian dengan RTRW kabupaten.

3) Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama di luar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan terutama di Jawa melalui:
   a) upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui penyusunan dan penerapan perangkat peraturan perundangan,
   b) pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektar diluar pulau Jawa terutama dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, bekas lahan pertambangan, serta memanfaatkan tumpangsari,
   c) melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif,
   d) melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan terutama pada lahan pertanian Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu,
   e) melakukan upaya reklamasi dan optimasi lahan pada lahan-lahan marginal dan sementara tidak diusahakan atau bernilai Indeks Pertanaman (IP) rendah.
4) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor), dan kawasan hutan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang masih dalam kawasan hutan (wewenang sektor kehutanan).
5) Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan, dan/atau menjadi lahan non-pertanian.
6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal dengan upaya-upaya yang akan dilakukan diantarnya:
   a) Melakukan perbaikan dan pencegahan kerusakan tanah, dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air.
   b) Melakukan penanaman tanaman pohon (buah-buahan) dan perkebunan di daerah kawasan aliran sungai, dan turut serta dalam sistem komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
   c) Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan

menerapan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.

7) Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan, melalui upaya:
   a) Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani.
   b) Upaya peningkatan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan air.
   c) Perbaikan struktur fisik tanah dan penambahan bahan organik, serta penerapan berbagai teknologi koservasi tanah dan air.
   d) Pengembangan dan memantapkan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, penyadaran, kepedulian dan partisipasi petani.

Tabel Sasaran Perluasan Areal Lahan Pertanian Tahun 2015-2019

Program/Lahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				(Ha)		
Cetak Sawah	40.000	130.000	250.000	280.000	300.000	1.000.000
Perluasan Areal	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
Perluasan Areal	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	95.000
Perluasan Areal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
TOTAL	65.000	165.000	285.000	315.000	335.000	1.165.000

b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

Dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter. Disamping itu juga diperlukan infrastruktur di luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jalan kabupaten, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya.
2) Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri, tapi juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang baik agar tepat lokasi dan sesuai kebutuhan.

3) Peningkatan sarana pertanian meliputi bantuan sarana pembuatan pupuk organik, biogas, sarana budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan sarana pemasaran.
4) Penguatan kelembagaan brigade tanam.
5) Penguatan peran kelompok tani dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Terkait dengan peningkatan layanan irigasi, maka dilakukan upaya-upaya seperti:

a) Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar Pulau Jawa.
b) Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi rusak pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bentuk pengelolaan dari pemerintah pusat.
c) Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
d) Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi.
e) Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem *out-contracting*.
f) Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification*/SRI, mengembangkan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian dan menggunakan kembali air buangan dari sawah (*water reuse*).
g) Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah.
h) Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

Dalam rangka pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
2) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.
3) Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman hingga di tingkat kabupaten
4) Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
5) Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/ perbibitan.
6) Membangun industri perbenihan dengan arah sebagai berikut:
   a) Kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas.
   b) Kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan.
   c) Industri benih berbasis komunitas.
   d) Riset berbasis perbenihan.
7) Untuk mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, maka importir pedagang benih diharuskan mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi produsen benih.
8) Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar) dan kelembagaan UPJA perkebunan.
9) Khusus untuk membangun perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras mulai dari keberadaan grand parent stock, parent stock sampai final stock. Sedangkan peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan bibit melalui penerapan sistem perbibitan, yaitu perbaikan mutu benih dan bibit ternak, optimalisasi kelembagaan perbibitan, sertifikasi, penjaringan, pemurnian, dan persilangan melalui penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

d. Penguatan kelembagaan petani

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, serta sarana produksi dan permodalan yang cukup

besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok maka akan memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani;
2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran;
3) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air, kelompok usaha pengolahan.
4) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

e. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Penyuluhan pertanian merupakan suatu kesisteman pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha yang berperanan dalam meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian oleh kelembagaan penyuluhan pertanian, pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri, maupun bekerjasama, berdasarkan programa penyuluhan pertanian yang disusun pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan penyuluhan tidak terlepas dari peran dan kontribusi aktif dari penyuluh pertanian, yang terdiri dari penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Penyuluh pertanian PNS pada

dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, pendidik/penasehat yang mengabadikan dirinya untuk kepentingan pada petani-nelayan beserta keluarganya. Oleh karena itu seorang Penyuluh Pertanian harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi penyuluhan tidak saja terbatas dilakukan oleh tenaga penyuluh yang ada, tetapi juga melibatkan unsur lainnya diantaranya unsur TNI dan instansi lainnya.

f. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

Dalam rangka pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Penyempurnaan sistem skim kredit program pertanian untuk memudahkan penyerapan oleh masyarakat petani/peternak dalam kegiatan usahatani tanaman dan ternak termasuk kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasarannya.
2) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi dan koperasi tani sebagai *channeling Agent* lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun non perbankan, untuk membiayai permodalan petani.
3) Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani.
4) Mengembangkan pola kerjasama petani dan pengusaha lokal sehingga ada yang menjadi avalis/penjamin bagi petani dalam meminjam modal usaha pertaniannya.
5) Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal.
6) Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan sesuai potensi wilayah. Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.
7) Mendorong investasi di pedesaan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya sektor pertanian di pedesaan. Untuk hal ini diupayakan pertumbuhan investasi dalam negeri sebesar 15%/tahun.
8) Mendorong berdirinya bank pertanian sebagai sumber pembiayaan kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir.

g. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan pasar produk pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Menyusun peta jalur pemasaran komoditas strategis termasuk komoditas yang sering terkendala distribusi yaitu cabai dan bawang merah dengan memanfaatkan tol laut guna membangun pasar yang terintegrasi dengan baik dari daerah produksi hingga ke konsumen.
2) Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan pasar produk pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga.
3) Fasilitasi kelembagaan pasar dan sistem resi gudang guna meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar bagi petani
4) Memperkuat peran atase pertanian di luar negeri dalam mendukung ekspor produk pertanian.
5) Menggalakkan kampanye positif produk-produk pertanian andalan ekspor.
6) Memperkuat diplomasi dagang produk pertanian baik secara bilateral, regional maupun multilateral.
7) Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor.
8) Membuka target pasar baru diluar pasar eksisting.

h. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1) Dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan pertanian seyogyanya lebih mengutamakan prinsip adaptasi tanpa mengabaikan aksi mitigasi, sehingga setiap aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian juga harus menjamin mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas.
2) Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga kegiatan aksi yang akan dipilih harus disesuaikan dengan sistem dan usaha pertanian rakyat. Aksi adaptasi dan mitigasi secara operasional

dijabarkan di tiap-tiap eselon I serta di tingkat daerah. Dengan demikian sektor pertanian ikut berkontribusi kepada target nasional dalam penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019.

3) Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah, sehingga teknologi yang akan diterapkan harus bersifat teknologi tepat guna dan spesifik lokasi dengan mengadopsi sebesar-besarnya kearifan lokal.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan penanganan dampak perubahan iklim tersebut, maka operasionalisasinya harus melembaga ke dalam sistem perencanaan teknokratis yang didukung dengan basis data dan sistem informasi yang valid dan terverifikasi. Pada akhirnya, bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan dampak perubahan iklim di lingkup pertanian adalah sangat luas, mulai dari pengambil kebijakan sampai pelaku usaha di lapangan, maka perlu dilakukan pengarusutamaan penanganan dampak perubahan iklim yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perumusan, negosiasi, konsensus dan sosialisasi kebijakan perubahan iklim harus dilakukan secara massif dan berkesinambungan.

Sasaran dari adaptasi perubahan iklim subbidang ketahanan pangan meliputi:

1) Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim,
2) Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission)
3) Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum.

Sedangkan strategi yang ditempuh dalam adaptasi perubahan iklim yaitu:

1) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
2) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim.

3) Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik.
4) Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rembug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam dan antisipasi perubahan iklim.

Fenomena bencana alam yang dialami diperlukan adanya kebijakan manajemen bencana yang mendorong kemandirian daerah dalam penanganan bencana. Oleh karena itu bentuk intervensi pemerintah dan pemerintah daerah harus didasarkan pada besarnya potensi dampak bencana terhadap penurunan produksi pertanian, sehingga perlu dibangun kriteria besarnya kejadian bencana untuk masing-masing jenis intervensi yang dibutuhkan. Apabila kejadian bencana hanya mengancam sasaran produksi suatu kabupaten/kota, maka penanganan bencana menjadi tanggung jawab kabupaten/kota yang bersangkutan. Apabila kejadian bencana hanya mengancam sasaran produksi suatu provinsi, maka penanganan menjadi tanggung jawab provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya Apabila kejadian bencana sudah mengancam sasaran produksi suatu nasional, maka penanganan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan intervensi bencana.

Perlindungan tanaman sebagai salah satu upaya dalam penanganan dampak perubahan ekologi dan ekosistem secara mendadak. Perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan, efisien dan diupayakan dilakukan dengan menggunakan musuh alami.

Beberapa langkah dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan diantaranya melalui:

1) Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso atau banjir.
2) Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani.
3) Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
4) Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman.
5) Revitalisasi gudang pestisida, penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman.

6) Penguatan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

i. Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian

Sarana produksi utama pertanian yang selama ini diberikan dan akan terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk mendukung usaha pertanian, yaitu benih dan pupuk. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menyediakan benih penjenis (*breeder seed*) dan benih dasar (*foundation seed*) dan mengendalikan penyediaan benih pokok (*stock seed*) dan benih sebar (*extention seed*) yang dilakukan oleh produsen benih melalui proses sertifikasi dan akreditasi. Adapun penyediaan pupuk dan organik sebagian besar dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyediaan pupuk organik dilakukan oleh pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat. Selain itu juga didorong tumbuhnya pengolahan pupuk organik yang diusahakan oleh kelompok tani, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke kelompok lain yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan subsidi benih dan pupuk, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat menjamin terlaksananya prinsip 6 tepat (yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam alokasi dan distribusi benih dan pupuk sesuai kebutuhan di masing-masing daerah melalui: (1) peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan dan masyarakat dalam penyediaan/produksi secara mandiri dan pendaftaran benih dan pupuk yang ramah lingkungan; (2) peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang; dan (3) pengawalan pembinaan dan pengawasan penggunaaan benih dan pupuk bersubsidi, serta (4) penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi/wilayah.

Beberapa strategi subsidi benih dan pupuk yang dibutuhkan adalah: (1) fokus pada penyediaan benih sumber melalui kerjasama dengan UPT dan UPTD perbenihan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah serta penguatan jalur benih antar lapang; (2) fokus pada peningkatan produksi dan penerapan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, yaitu padi inbrida dan hibrida, jagung komposit dan hibrida dan kedelai melalui kerjasama produksi dengan penangkar benih lokal sebagai upaya mendorong

tumbuhnya industri perbenihan yang mandiri; (3) fokus pada penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi dengan mendorong peningkatan penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui subsidi harga dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik di tingkat petani; (4) fokus pada keluwesan perubahan pagu alokasi subsidi antar daerah, antar waktu dan antar sub-sektor yang didukung dengan upaya peningkatan pengawasan produksi dan peredaran benih dan pupuk melalui peningkatan kinerja komisi pengawasan benih dan pupuk untuk menjamin terlaksananya prinsip 6 Tepat; serta (5) fokus pada pembinaan dan bimbingan teknis kelompok tani dalam penyusunan rencana pengajuan usulan benih dan pupuk bersubsidi (penyusunan RDKK).

Terkait dengan sistem pembiayaan usaha pertanian, terdapat berbagai sumber pembiayaan pertanian yang saat ini tersedia untuk mendukung usaha pertanian yang mencakup perbankan konvensional dan syariah, non perbankan, investasi BUMN dan swasta, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), lembaga masyarakat adat, serta fasilitasi melalui APBN dan APBD. Secara khusus, Pemerintah berupaya menyediakan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada petani untuk mengakses sumber pembiayaan kredit pertanian. Untuk itu, dalam periode 2015-2019 dibutuhkan keberadaan kebijakan pembiayaan yang dapat: (1) mengintegrasikan skema kredit yang mudah diakses, prosedur mudah dan persyaratan lunak, (2) menciptakan skema kredit dengan penyediaan subsidi bunga dan atau penjaminan , (3) menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari daerah, perbankan dan pusat (4) dukungan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah dari pusat dan daerah dalam mendampingi petani untuk mengakses sumber permodalan yang tersedia, serta memantau, mengawasi dan melaporkan ketepatan dalam proses pengajuan, pencairan dan penggunaannya; (5) perlindungan terhadap usaha pertanian dan mengurangi dampak resiko (mitigasi) melalui pengembangan usaha pertanian; dan (6) memperkuat status legalitas kepemilikan asset petani.

j. Perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dalam kegiatan usahataninya, maka dikembangkan asuransi pertanian. Diharapkan asuransi pertanian dimanfaatkan oleh petani untuk memberi rasa aman dan

mencegah tingkat kerugian yang lebih banyak bila mengalami musibah kekeringan, kebanjiran atau kegagalan panen akibat serangan hama.

k. Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi

Dalam mengembangkan berbagai inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya pada tiga komoditas utama pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai, melalui: a) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim; b) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap perubahan iklim; c) Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik; d) Budidaya dan bertani secara berkelanjutan dengan baik, penanganan hasil panen yang baik, pengolahan/pasca panen dan membangun sistem distribusi yang baik. Indikasi atau ukuran keberhasilan pelaksanaan teknologi tersebut adalah standar terhadap produk pertaniannya. Produk pertanian yang baik memenuhi kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Teknologi yang mampu mendaur ulang proses pemanfaatan (*zero waste*) dan pemanfaatan sumberdaya lokal serta diversifikasi merupakan salah satu bagian dari strategi penguatan teknologi. Ke depan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas dan fasilitas peneliti di bidang pertanian
2) Meningkatkan penelitian yang memanfaatkan teknologi terkini dalam rangka mencari terobosan peningkatan produktivitas benih/bibit tanaman/ternak.
3) Memperluas cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, teknik budidaya, teknik pasca panen, teknik pengolahan hingga teknik pengemasan dan pemasaran.
4) Meningkatkan diseminasi teknologi kepada petani secara luas
5) Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru di tingkat lapangan.

2. Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, dilakukan melalui strategi:

a. koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan.

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan dilakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

- Penyediaan pangan strategis beras, jagung dan kedelai dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau,
- melakukan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah provinsi dan kabupaten dan pihak swasta,
- menyusun dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan peningkatan ketersediaan pangan yang bermutu, penggunaan sumberdaya alam yang efisien, ramah lingkungan, teknologi tepat guna,
- mendorong terbangunnya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sehingga harga jual produk pangan menjadi lebih kompetitif dan adil,
- mendorong memperkuat cadangan pangan pemerintah dan masyarakat desa,
- mendorong produksi olahan pangan berbasis sumberdaya lokal.
- memperkuat sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan,
- mendorong pemangku kepentingan menyediakan cadangan beras sebanyak 12 ribu ton sebagai dukungan kolektif terhadap cadangan beras yang dibebankan pada seluruh negara Asean plus Three sebanyak 787 ribu ton,
- mendorong adanya dana cadangan beras sebagai instrumen tanggap darurat jika terjadi kerawanan pangan yang diakibatkan oleh bencana,
- mendorong tersedianya dan tersalurkannya bantuan pangan bagi keluarga miskin,
- mendorong tersedianya dan tersalurkannya pangan bersubsidi.
- mendorong penanggulangan kemiskinan di pertanian dan pedesaan,
- pemantauan harga pangan strategis secara berkala
- serta mendorong pihak swasta untuk ikut berperan dalam penyediaan pangan, distribusi pangan dari sentra produsen ke sentra konsumen.

b. mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga

Dalam upaya mendorong kemandirian pangan di level kabupatendan keluarga dilakukan upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi koordinasi pusat-daerah,

- merespon dan mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan pangan dan gizi di daerah.
- mendorong terbentuknya, berjalan dan berfungsinya dengan baik Dewan Ketahanan Pangan di daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- DKP daerah menyelenggarakan forum koordinasi berupa konferensi DKP untuk koordinasi DKP provinsi dan sidang regional DKP untuk koordinasi kabupaten/kota,
- mendorong berjalannya Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang berada di tingkat provinsi hingga di tingkat kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum di daerah termasuk masalah ketahanan pangan di daerah.
- pengembangan pasar untuk melayani kebutuhan pangan masyarakat baik tingkat kabupaten maupun desa.
- mendorong lumbung pangan desa .
- pengembangan pangan lokal untuk kebutuhan keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga
- penguatan sistem isyarat dini kerawanan pangan dan gizi baik hingga di tingkat kecamatan.

c. menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal

- Pembinaan sistem produksi dan konsumsi pangan masyarakat agar terhindar dari cemaran biologis, kimia dan fisik yang berbahaya,
- pemanfaatan lahan pekarangan,
- pengenalan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis pangan lokal,
- sosialisasi, promosi dan kampanye diversifikasi konsumsi pangan,

3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional

a. Pengembangan kawasan pertanian

Kawasan pertanian adalah merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan

bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Pengembangan kawasan pertanian dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi mandiri dan ketentuan tata ruang wilayah.

Tabel Tugas Pengelola Kawasan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

	Pusat	Provinsi	Kabupaten / kota
Pusat	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	
Provinsi	Melaporkan kinerja dan permasalahan	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan,
Kabupaten		Melaporkan kinerja dan permasalahan	Pembinaan di tingkat lapangan

Untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan dalam pengembangan kawasan pertanian, maka secara garis besar dapat dirumuskan langkah-langkah pengembangan kawasan, yaitu sebagai berikut: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi, (7) pengembangan industri hilir.

Rancang bangun dan kelembagaan dibutuhkan dalam pengembangan kawasan secara berjenjang. Rancang bangun pengembangan kawasan disusun berdasarkan analisis teknokratis dan rencana kerja melalui telaah kebijakan serta analisis pemeringkatan, klasifikasi dan pemetaan kawasan, serta analisis data dan informasi tabular dan spasial untuk mengarahkan pengembangan dan pembinaan kawasan. Pengelola Kawasan di provinsi menyusun rencana induk (*Master Plan*) untuk setiap jenis kawasan yang ada di provinsi sebagai upaya untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan,

program/kegiatan pengembangan kawasan nasional. Adapun Pengelola Kawasan di Kabupaten/Kota menyusun rencana aksi (*Action Plan*) yang merupakan penjabaran operasional dari Master Plan sebagai upaya untuk rencana yang lebih rinci dalam kurun waktu tahun jamak (*multi years*). Pengelolaan kawasan dilakukan secara berjenjang, mulai pengelola di pusat, di provinsi dan di kabupaten/kota.

Sumber pembiayaan pengembangan kawasan pertanian nasional berasal dari APBN, investasi swasta dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan dalam pengembangkan potensi yang ada, melanjutkan dari kondisi saat ini, pengutuhan kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran. Diupayakan agar sekurang-kurangnya sebesar 30 persen dari total APBN tahunan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan akan dialokasikan untuk menfasilitasi pengembangan kawasan pertanian nasional. Gubernur dan bupati/walikota berperan mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian nasional melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam lokasi kawasan pertanian nasional, dapat mengalokasikan APBD dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan. Kementerian Pertanian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong minat investor (BUMN, BUMD, PMA, PMDN, koperasi dan lainnya) untuk mengembangkan kawasan pertanian nasional.

b. Pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakatnya yang sebagian besar petani. Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara daerah perbatasan dengan negara tetangga, sehingga akan mendorong utuhnya NKRI. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan potensi ekonomi di bidang pertanian, meningkatkan perdagangan ekspor-impor, menurunnya kegiatan perdagangan produk pertanian ilegal, serta memperkuat layanan perkarantinaan di perbatasan.

Pengembangan daerah tertinggal ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan daerah maju. Dalam pendekatan sektor

pertanian, tidak terlepas dalam penyediaan sarana dan prasaran produksi yang memadai, mempercepat peningkatan kapasitas petani, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, penguatan jaringan pasar produk pertanian, dan promosi potensi pertanian daerah tertinggal. Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan lebih memberdayakan Orang Asli Papua di bidang produksi pertanian.

c. Pembangunan desa dan kawasan desa

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan didorong dalam upaya mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota. Penguatan usaha budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian sebagai bagian dari usaha ekonomi masyarakat desa dalam ikut mengurangi jumlah desa tertinggal. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian menjadi hal yang perlu diperhatikan. Diharapkan tiap desa memiliki komoditas pertanian unggulan yang diarahkan menjadi sentra produksi salah satu komoditas pertanian sebagai bekal menjadi desa mandiri. Desa-desa yang memiliki kemampuan didorong untuk menjadi desa mandiri benih dan desa organik. Untuk itu diharapkan anggaran desa juga dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian, memperkuat kelembagaan usaha pertanian, serta meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pengolahan hasil pertanian.

d. Fokus komoditas strategis

Terkait dengan fokus komoditas yang dikembangkan terdiri dari delapan kelompok produk, diantaranya yaitu:

1) Bahan makanan pokok nasional: padi, jagung, kedelai, gula, telur dan daging unggas, daging sapi/kerbau
2) Bahan makanan pokok lokal: sagu, jagung, umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar)
3) Produk pertanian penting pengendali inflasi: cabai, bawang merah, bawang putih
4) Bahan baku industri (konvensional): sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, teh, susu, ubi kayu
5) Bahan baku industri: sorgum, gandum, tanaman obat, minyak atsiri, cengkeh
6) Produk industri pertanian (prospektif): aneka tepung dan jamu
7) Produk energi pertanian (prospektif): biodiesel, bioetanol, biogas

8) Produk pertanian berorientasi ekspor dan subtitusi impor: buah-buahan (nanas, manggis, salak, mangga, jeruk), kambing/domba, babi, florikultura.

Pengembangan fokus komoditas ini diupayakan agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan suatu jenis komoditas di suatu wilayah sesuai potensi wilayah dan sosioklutur setempat.

e. Pengarusutamaan gender

Pengarustamaan gender (PUG) mengarah kepada aspek kesetaraan dan keadilan petani (laki-laki dan perempuan) dengan memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta dampaknya pada seluruh pelaku pembangunan. Telah menjadi komitmen Kementerian/Lembaga sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Kementerian/ Lembaga diwajibkan menerapkan PUG sebagai salah satu strategi dalam pencapaian program kerjanya. Strategi tersebut juga harus dilaksanakan pada kebijakan pembangunan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta mendorong setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program diawali dengan proses analisis gender melalui empat aspek, yaitu: partisipasi, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari pelaku itu sendiri.

f. Kerjasama bilateral, regional dan internasional

Kerjasama antarnegara dalam bilateral, regional maupun dalam organisasi internasional didasari atas saling menghormati antar negara merdeka dan memberi manfaat saling menguntungkan. Salah satu bidang kerjasama diantaranya adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), sebagai perwujudan kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, nonkondisionalitas, saling menguntungkan dan *non-interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan–Selatan. Kerjasama di sektor pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.

Dalam era MAsyarakat Ekonomi Asean (MEA), arus barang dan jasa akan semakin terbuka antar negara Asean. Hanya yang efisienlah yang mampu

bertahan di era pasar tersebut. Untuk itu diperlukan kesiapan dan kebijakan yang tepat agar di sisi produk pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar domestik maupun di pasar luar.

4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian

a. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian

Terdapat tiga komponen SDM pertanian yaitu: 1) non-aparatur yang meliputi petani/tenaga kerja pertanian dan pelaku usaha pertanian lainnya, 2) aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural yang lebih berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian, 3) lembaga petani pedesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), koperasi, lembaga keuangan mikro, kios sarana produksi, dan lembaga pemasaran.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian tersebut, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Pengembangan dan penguatan kapasitas penyuluh Pertanian Polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
2) Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3) Pelatihan bagi pengelola P4S dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT Pelatihan, sedangkan Pelatihan bagi petani pelaku utama agribisnis dilaksanakan oleh P4S.
4) Pendidikan Tinggi bidang Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak (PBT), Pengawas Mutu Pakan Ternak, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, fungsional informasi pasar dan Karantina.
5) Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknisi menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian.

b. Meningkatkan dukungan perkarantinaan

Institusi Karantina Pertanian Nasional dihadapkan kepada upaya pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) di berbagai sektor guna mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang telah lebih jauh melangkah. Untuk itu diperlukan a) Regulasi teknis, sumber daya, dana, sarana dan fasilitas pendukung yang handal guna melindungi sumber alam hayati nasional, b) Implementasi berbagai regulasi internasional ke dalam sistem regulasi nasional perkarantinaan; c) meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; d) Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan dukungan perkarantinaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Menyiapkan regulasi teknis, sumberdaya, dana, sarana dan fasilitas pendukung yang handal guna melindungi sumber alam hayati.
2) Implementasi berbagai regulasi internasional kedalam sistem regulasi nasional perkarantinaan.
3) Meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada mayarakat dan pemangku kepentingan.
4) Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.

c. Mengelola regulasi

Dalam rangka pengelolaan regulasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Identifikasi kebutuhan regulasi dan turunan regulasi.
2) Menyusun perencanaan penyusunan regulasi lima tahunan
3) Melaksanakan dengar pendapat dari masyarakat terkait dengan konsep peraturan yang akan diterbitkan.
4) Menfasilitasi terbitnya regulasi yang telah disusun.
5) Melakukan review terhadap regulasi yang telah dikeluarkan dna mengevaluasi efektivitasnya.

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
2) Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.
3) Melaksanakan e-government dengan dukungan teknologi informasi terkini.
4) Pengelolaan aplikasi dalam mendukung manajemen pembangunan
5) Pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
6) Penguatan sistem database sebagai penunjang pengambil kebijakan.

e. Mengelola perencanaan yang efisien

Dalam rangka pengelolaan perencanaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan lima tahunan,
2) Melakukan review terhadap dokumen renstra, renja serta kebijakan yang diambil.
3) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan pertanian lintas sektor dan pusat-daerah, serta
4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan pertanian.

f. Mengelola sistem pengawasan

Dalam rangka pengelolaan sistem pengawasan, maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Pengelolaan arah dan strategi kementerian sebagai satu visi bagi setiap aparatur pelaksana,
2) melakukan peninjauan manajemen terhadap jalannya pelaksanaan program,
3) melakukan pengawasan internal,
4) melakukan pengukuran dan pengelolaan kepuasan stakeholders
5) melakukan pengendalian dokumen dan pengarsipan.

g. Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati

Sesuai dengan UU No. 5 tahun 1994, keanekaragaman hayati (KEHATI) merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, keanekaragaman hayati terdiri atas tiga tingkatan, yaitu

keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem.

Kebijakan yang terkait dengan keanekaragaman hayati meliputi: 1) peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan, 2) peningkatan perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, 3) memberikan manfaat dan nilai ekonomi dari kekayaan hayati melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan baru lokal dalam mendukung diversifikasi pangan, biofarmaka, kosmetika dan pemanfaatan lainnya, serta 4) pengembangan iptek dan peningkatan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati.

g. Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi

Dalam mendorong majunya bioindustri dan bioenergi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1) Menyusun peta jalan pengembangan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
2) Penguatan pasokan hasil produksi komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi melalui pola kawasan produksi.
3) Mengembangkan industri pengolahan sederhana berbasis di pedesaan
4) Mendorong industri menerapkan *zero waste* management.
5) Mendorong berkembangnya pengolahan lanjutan di dalam negeri dari komoditas pertanian dengan mengacu pohon industri yang ada dan berkembang.
6) Mendorong investasi PMA dan PMDN bidang pengolahan hasil pertanian terutama berteknologi menengah dan tinggi.

B. Langkah Operasional

Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka disusun langkah operasional sebagai berikut :

1. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

Dalam rangka pencapaian sasaran pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan pangan nasional, maka disusun langkah operasional peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Target swasembada dari ketiga komoditas tersebut menjadi penting dalam rangka pemenuhan

kebutuhan nasional dengan mengedepankan produksi dalam negeri dan kemandirian didalam menentukan kebijakan nasional di bidang pangan. Langkah operasional peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai terbagi dua yaitu peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas.
Peningkatan Luas Penanaman

a. Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar
   - Optimasi lahan 1 juta hektar,
   - Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta untuk produk pertanian lainnya,
   - Peningkatan indeks pertanaman (IP),
   - Pemanfaatan lahan terlantar,
   - Penerapan pola tumpangsari.
   - Pemanfaaatan pertambahan luas areal beririgasi tersier

b. Peningkatan Produktivitas
   - Penerapan pengelolaan usahatani dengan sistem yang lebih baik
   - Penyediaan benih unggul padi dan jagung
   - Subsidi dan penyediaan pupuk lebih dari 9 juta ton pertahun
   - Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit
   - Pembangunan 1000 desa mandiri benih
   - Pemberdayaan penangkar benih
   - Bantuan alat dan mesin pertanian lebih dari 70 ribu unit,
   - Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi air untuk lebih dari 4,5 juta hektar,
   - Peningkatan kapasitas teknis pertanian untuk 70 ribu orang
   - Pengembangan kawasan produksi padi, jagung dan kedelai berskala ekonomis dan berdaya saing
   - Pemanfaatan kalender tanam
   - Penyediaan teknologi padi, jagung dan kedelai
   - Penyediaan benih sumber padi, jagung dan kedelai
   - Penciptaan varietas unggul baru padi, jagung, kedelai
   - Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
   - Penerapan pengendalian hama dan penyakit
   - Penerapan asuransi pertanian

c. Dukungan Pasca Panen, pengolahan dan Pemasaran
   - Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,
   - Revitalisasi penggilingan padi sekitar 2 ribu unit
   - Dukungan science dan agro techno park di daerah sentra produksi
   - Penyediaan model revitalisasi penggilingan padi kecil dan penanganan pasca panen jagung dan kedelai

d. Dukungan Kelembagaan
   - Penguatan balai penyuluhan lebih dari 4000 unit
   - Pengendalian rekomendasi impor
   - Mendorong struktur pasar yang lebih baik untuk meningkatkan margin petani
   - Penyediaan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian komoditas padi, jagung dan kedelai

2. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Tebu

Tebu sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian dimana gula berbasis tebu menjadi komoditas strategis untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Gula berbasis tebu dikelompokkan menjadi GKP (gula Kristal putih) yang biasa dikonsumsi dalam skala rumah tangga dan GKR (gula Kristal rafinasi) yang banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti industri makanan dan minuman. Target lima tahun ke depan adalah tercapainya kebutuhan konsumsi gula rumah tangga.

Beberapa langkah operasional dalam mencapai peningkatan produksi tebu meliputi:

a. Pemantapan Areal Tebu
   - Pemantapan lahan tebu lebih dari 100 ribu ha
   - Penyediaan lahan untuk kebun benih unggul
   - Pemanfaatan lahan marginal untuk tanaman tebu
   - Suplesi air melalui embung atau pompanisasi
   - Penyediaan traktor pengolah tanah dan sarana produksi lainnya

b. Peningkatan Produktivitas Tebu

- Pengembangan Kawasan Produksi Tebu berskala ekonomis dan berdaya saing
- Penataan varietas tebu dan pengadaan benih tebu, sarana produksi lainnya
- Penerapan pengelolaan budidaya yang baik
- Melakukan bongkar ratoon dan rawat ratoon
- Penyediaan benih sumber dan teknologi tebu
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman
- Bantuan alat mesin pertanian

c. Penguatan di sektor hilir pergulaan

- Mendorong revitalisasi pabrik gula yang ada
- Mendorong berdirinya pabrik gula yang baru di sentra produksi tebu
- Optimalisasi hari giling untuk mencegah penurunan rendemen
- Pemanfaatan kapasitas giling pabrik gula
- Membantu pengolahan dan pemasaran gula rakyat
- Mendorong penerapan Kebijakan ekspor , proteksi atau pembatasan impor serta pengaturan harga yang kondusif dan bersaing

d. Dukungan Kelembagaan

- Penguatan kelembagaan riset untuk tebu
- Penguatan kelembagaan usahatani dan keterampilan petani tebu
- Fasilitasi kredit yang diberikan melalui KPTR
- Pembiayaan untuk revitalisasi dan pembangunan pabrik gula
- Penyempurnaan pengaturan tataniaga pertebuan
- Menjaga stabilitas harga di tingkat petani
- Rekomendasi kebijakan impor dan ekspor gula
- Mendukung kemudahan dan Percepatan penerbitan sertifikasi lahan petani dan HGU perkebunan.
- Penerapan standar mutu komoditas tebu dan gula

Kementerian Pertanian terus berupaya mengembangkan komoditi tebu di wilayah sentra-sentra pengembangan tebu melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas gula. Wilayah provinsi yang dijadikan sentra pengembangan tebu antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Jambi dikembangkan komoditas tebu yang pada saat ini ditujukan sebagai penghasil gula merah karena belum adanya pabrik gula di wilayah tersebut serta dengan memperhatikan potensi lahan, kemampuan dan kebutuhan sentra wilayah tersebut sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan gula merah sebagai bahan baku industri skala rumah tangga.

3. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Daging

Peningkatan produksi daging dan dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan antara lain meliputi peningkatan populasi dan distribusi ternak dari kawasan padat ke wilayah berlimpah biomassa tetapi kosong ternak, serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan air dan pakan murah, pelayanan pejantan unggul, pelayanan inseminasi buatan yang lebih baik dan penerapan *good farming practices*. Selain itu dilakukan peningkatan produksi daging melalui penggemukan dan tunda potong sesuai potensi genetik dan potensi ekonomi ternak, pencegahan pemotongan sapi (ternak) betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengurangi angka mortalitas anak dan induk serta peningkatan mutu genetik ternak melalui seleksi dan persilangan. Langkah-langkah operasional yang akan dilakukan antara lain meliputi:

a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
   - Produksi benih ternak lebih dari 4 juta dosis/tahun
   - Optimalisasi Reproduksi lebih dari 1 juta ekor/tahun
   - Produksi calon indukan atau calon bibit lebih dari 150 ribu ekor/tahun
   - Pengadaan indukan dan pejantan sapi
   - Penyediaan galur unggul sapi
   - Penyediaan teknologi peternakan sapi
   - penyediaan bibit sumber ternak
   - Penyediaan seed vaksin

b. Pengembangan pakan ternak
   - Pengembangan hijauan pakan ternak di lebih dari 30 ribu hektar lahan kering
   - Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan
   - Pengembangan Mutu dan keamanan Pakan

- Penciptaan varietas unggul baru ternak
- Penyediaan benih sumber tanaman pakan ternak

c. Kesehatan hewan
   - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
   - Penanganan gangguan reproduksi
   - Penyediaan teknologi veteriner

d. Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha Peternakan
   - Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat
   - Konsolidasi penguatan kapasitas peternak
   - Peningkatan keamanan produk hewan
   - Pengembangan usaha pengolahan hasil ternak
   - Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak dan hasil ternak

4. Langkah Operasional Peningkatan Distribusi Pangan

a. Distribusi pangan merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Distribusi pangan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
b. Monitoring stok dan distribusi gabah/beras di tingkat penggilingan padi regional / nasional;
c. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan perumusan kebijakan harga gabah/padi;
e. Pemetaan potensi panen, monitoring serapan lembaga distribusi pangan dan prognosa neraca pangan;
f. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat.

5. Langkah Operasional Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Pangan

a. Peningkatan akses dan pemanfaatan pangan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
b. Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
c. Penanganan Kerentanan dan Kerawanan Pangan sesuai hasil pemetaan;
d. Pembangunan lumbung pangan masyarakat
e. Membangun kawasan Mandiri pangan
f. Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);

g. Intervensi dan Mitigasi Penanganan Rawan/Kurang Pangan;
h. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP/KRPL);
i. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.

6. Langkah Operasional Peningkatan Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal

Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan pekarangan pangan di lebih dari 2500 desa
b. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
c. Pendidikan konsumsi pangan lokal melalui jalur pendidikan formal dan non-formal;
d. Penyusunan Peta Pangan Lokal Nasional;
e. Pemantauan Penganekaragaman konsumsi pangan
f. Pengembangan model pangan pokok lokal
g. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal UMKM dan Rumah Tangga.

7. Langkah Operasional Stabilisasi Produksi Cabai dan Bawang Merah

Stabilisasi produksi cabai dan bawang merah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Cabe dan Bawang Merah
   - Pengembangan kawasan cabe dan bawang merah
   - Perbaikan infrastruktur kebun/lahan (jalan usaha tani, rumah kaca, dll)
   - Penerapan GAP melalui Sekolah lapang GAP
   - Registrasi kebun dan Registrasi bangsal pasca panen
   - Fasilitasi sarana prasarana pasca panen
   - Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
   - Penyediaan teknologi cabai dan bawang merah

b. Pengembangan sistem perbenihan
   - Penguatan kelembagaan perbenihan
   - Penumbuhan industri benih
   - Penyediaan benih sumber
   - Penyediaan benih sebar tanaman cabe dan bawang merah

- Penciptaan varietas unggul cabai dan bawang merah off season

c. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan
   - Pengelolaan OPT melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu
   - Pengembangan klinik PHT
   - Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman
   - Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
   - Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif

d. Peningkatan pengolahan dan Pemasaran Cabe dan Bawang Merah
   - Pengembangan unit pengolahan hortikultura (Gudang Pengering dan Pengolahan)
   - Pengembangan infrastruktur kelembagaan pasar (Pasar Tani, Terminal Agribisnis dll)
   - Pengembangan Sistem Logistik dan Pergudangan (cold change) sebagai Sistem Stok
   - Rekomendasi Kebijakan Impor dan ekspor hasil hortikultura
   - Penyediaan teknologi pasca panen cabai dan bawang merah

e. Pemantauan dan Antisipatif Harga Cabe dan Bawang Merah
   - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan perumusan kebijakan harga cabe dan bawang merah;
   - Pengembangan lembaga usaha pangan masyarakat;
   - Pemetaan potensi dan monitoring serapan panen;
   - Pemantauan dan Tindaklanjut gejolak harga cabe dan bawang merah.

8. Langkah Operasional Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

Sasaran antara dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk unggulan pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian. Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian.

Dalam rangka pengembangan komoditas yang bernilai tambah sebagai bagian dari kesiapan hulu dan budidaya, maka langkah-langkah yang diupayakan antara lain:

a. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang berdaya saing, melalui:

1) Pengembangan kawasan hortikultura
   - Pengembangan lebih 1500 ha/thn kawasan tanaman sayuran
   - Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
   - Registrasi lebih dari 1200 lahan usaha hortikultura dan bangsal pasca panen
   - Fasilitasi lebih dari 2000 unit sarana prasarana pasca panen
   - Penerapan teknologi inovatif
   - Pengembangan desa organik berbasis hortikultura

b. Pengembangan sistem perbenihan
   - Penguatan kelembagaan perbenihan
   - Penumbuhan industri benih
   - Penyediaan benih sumber
   - Penyediaan benih sebar tanaman sayuran bermutu
   - penyediaan benih sumber hortikultura
   - Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan
   - Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman
   - Pengembangan klinik Pengendalian Hama Terpadu sekitar 150 unit/thn
   - Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman
   - Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
   - Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif
   - Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim
   - Penyediaan teknologi hortikultura

c Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang berdaya saing, melalui:

1). Pemantapan Areal Kebun

- Pemantapan lahan perkebunan sekitar 100 ribu ha/thn
- Penyediaan lahan untuk kebun benih unggul
- Pemanfaatan lahan marginal
- Suplesi air melalui embung atau pompanisasi
- Penyediaan traktor pengolah tanah dan sarana produksi lainnya

2). Peningkatan Produktivitas

- Penyediaan dan pengadaan benih berkualitas
- Penerapan pengelolaan budidaya yang baik
- Pembinaan penanganan hama melalui SL-PHT
- Antisipasi dampak perubahan iklim
- Penanganan organisme penganggu
- Penyediaan benih sumber komoditas perkebunan
- Penyediaan teknologi perkebunan
- Penerapan standar mutu

3). Kelembagaan dan Pembiayaan

- Penguatan kelembagaan dan hasil riset perkebunan
- Penguatan kelembagaan usahatani dan peningkatan keterampilan petani
- Pengembangan diversifikasi usaha perkebunana secara intensif dan berkelanjutan
- Mendorong pengembangan komoditas unggulan local yang prospektif ekspor,
- Fasilitasi kredit
- Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
- Mendorong berkembangnya industri hilir perkebunan skala rumah tangga dan industri

4). Kebijakan pemerintah

- Penyempurnaan pengaturan tataniaga hasil perkebunan
- Menjaga stabilitas harga di tingkat petani
- Rekomendasi kebijakan ekspor dan impor produk perkebunan
- Menyiapkan kerangka regulasi yang dibutuhkan
- Mendorong promosi komoditas perkebunana yang layak ekspor

d. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan yang berdaya saing, melalui:

1). Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
- Produksi calon indukan/calon bibit ternak lainnya (ekor)
- Penguatan sarana dan prasarana SPR ternak lainnya (paket)

2). Pengembangan pakan ternak
- Pengembangan pakan olahan/bahan pakan ternak lainnya (ton)

3). Kesehatan hewan
- Peningkatan penanganan penyakit ternak lainnya
- Penurunan pravelensi penyakit
- pembebasan wilayah penyakit
- peningkatan produksi obat hewan, vaksin dan bahan biologik

4). Pengolahan dan Pemasaran hasil ternak
- Pengembangan usaha pengolahan hasil (unit)
- Pengembangan pengolahan investasi (lokasi)
- Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran (Unit)
- Penguatan kelembagaan (lokasi)

5). Penjaminan Pangan Asal Hewan Ternak
- Penjaminan produk hewan ASUH (unit)
- Pengendalian zoonosis (unit)
- Penerapan kesrawan (unit)

6). Pengembangan pakan ternak
- Penerapan SAKIP (dok)
- Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan).

9. Langkah Operasional Penyediaan dan Peningkatan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi

Sasaran penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri dan energi terbarukan dari komoditas pertanian.

Dalam sasaran nasional kedaulatan energi, sasaran pemanfaatan bahan bakar nabati adalah : (i) produksi biodiesel sebesar 4,3 – 10 juta KL; dan (ii) produksi bioetanol sebesar 0,34 – 0,93 juta KL, dan terlaksananya pembangunan perkebunan untuk bioenergi pada beberapa lokasi yang potensial. Beberapa komoditi yang dapat dijadikan bahan baku bioindustri dan bioenergi, diantaranya kelapa sawit, kelapa dan ubi kayu.

Langkah operasional dalam penyediaan dan peningkatan bahan baku energi meliputi:

a. Penyediaan bahan baku bioindustri
   - Pengembangan dan penerapan standar mutu komoditas bahan baku industri melalui penerapan GAP, GHP, GMP dan ISPO
   - Pengembangan kawasan produksi komoditas bahan baku bioindustri yang terintegrasi dengan kawasan industri
   - Pengembangan riset dalam rangka pemanfaatan secara optimal kandungan hasil tanaman dan ternak
   - Penyediaan model pengembangan inovasi teknologi pertanian bioindustri
   - Mendorong intergrasi ternak – tanaman untuk menciptakan siklus energi yang lebih tertutup
   - Mendorong penerapan zero waste management

b. Penyediaan bahan baku bioenergi
   - Mendorong ketersediaan bahan baku nabati dalam upaya penyediaan energi terbarukan (termasuk biofuel) sebesar 23% dari total pemanfaatan energi nasional di tahun 2025
   - Pemanfaatan produk samping hasil ternak dan tanaman sebagai bahan baku energi
   - Pengembangan komoditas potensi antara lain sebagai bahan baku energi tanpa mengganggu target produksi bahan pangan masyakarat
   - Pengembangan riset bioenergi yang efisien

10. Langkah Operasional Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani

Sasaran dari peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani, meskipun peningkatan pendapatan petani tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan karena tergantung pula dari tingkat pengeluaran dan faktor-faktor non finansial (sosial). Namun pendapatan petani merupakan indikator yang secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, sehingga indikator dari sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan rumahtangga petani.

Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, tidak saja melalui peningkatan produktivitas hasil pertaniannya tapi juga melalui peningkatan produktivitas per petani. Untuk itu perlu dilakukan terobosan manajemen usahatani yang memberikan efisiensi pengelolaan usahatani, baik melalui usahatani sistem korporasi ataupun dengan sistem terobosan lainnya. Upaya ini untuk mengurangi petani gurem yang hanya mengusahakan kurang dari setengah hektar lahan, sehingga mampu mengusahakan lahan hingga seluas 2 hektar.

Peningkatan pendapatan keluarga petani dilakukan melalui:

a. Perlindungan petani
   - Penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input (benih dan pupuk)
   - Pengamanan harga produk hasil pertanian (HPP)
   - Pelaksanaan asuransi pertanian
   - Mendorong pembentukan Bank Pertanian

b. Pemberdayaan petani
   - Penguatan kelembagaan petani menjadi Koperasi Petani/ Badan Usaha Milik Petani (BUMP)
   - Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen usaha melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
   - Fasilitasi akses terhadap teknologi dan informasi melalui Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP)
   - Fasilitasi akses terhadap sumber-sumber permodalan/ perbankan.
   - Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan budidaya maupun pengolahan hasil pertanian

c. Penguasaan Lahan untuk Pertanian
   - Konsolidasi lahan pertanian atau konsolidasi manajemen usaha budidaya pertanian mencapai skala ekonomis layak dan berdaya saing

d. Penambahan penghasil dari Hasil Pertanian
   - Penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha industri pengolahan hasil pertanian skala kecil rumah tangga berskala ekonomis layak dan berdaya saing
   - Pemanfaatan hasil samping dan limbah dari usaha industri pengolahan hasil pertanian
   - Peningkatan efisiensi usaha dan pemasaran hasil pertanian

11. Langkah Operasional Peningkatan Kualitas Petani dan Kelembagaannya

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani diperlukan adanya peningkatan kualitas petani beserta kelembagaanya. Untuk itu, langkah-langkah dalam meningkatkan kemampuan petani dan kelembagaannya antara lain melalui:

a. Peningkatan pendapatan keluarga petani dilakukan melalui:
   - Pemberdayaan petani/ P4S dalam bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan Ketahanan pangan
   - Penumbuhan dan pengembangan kelompoktani dan gabungan kelompoktani melalui kelas kemampuan kelompok
   - Pelatihan dan magang
   - Pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi melalui kursus tani, hari lapang petani, rembug tani dan lainnya
   - Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui community development
   - Pengembangan pos penyuluhan Desa (Posluhdes)
   - Penumbuhan Badan Usaha Milik Petani melalui jaringan dan kemitraan usaha
   - Pengawalan dan pendampingan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
   - Pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha

12. Langkah Operasional Peningkatan Kualitas Aparatur dan layanan Kelembagaan

Dalam upaya terwujudnya reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian, maka salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan aparatur dan layanan kelembagaan dari unit kerja yang ada di Kementerian Pertanian. untuk itu, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penataan dan Penguatan Organisasi
   - Penataan organisasi yang *right sizing* dan memenuhi kebutuhan sesuai tugas dan fungsi yang diamanahkan,
   - Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
   - Penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Pertanian,

- Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang nyaman dan kondusif
- Menjalin sinergitas antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

b. Membangun budaya kerja yang profesional
   - Peningkatan kualitas dan disiplin kerja
   - Penguatan sistem perencanaan yang berorientasi hasil
   - Penyelenggaran monitoring dan evaluasi yang terstruktur
   - Penyiapan regulasi yang tepat dan bermanfaat
   - Melakukan mitigasi risiko hukum dan non hukum dari kegiatan strategis yang dijalankan
   - Peningkatan layanan memuaskan
   - Peningkatan PNBP pada unit kerja tertentu
   - Penguatan layanan property right hasil temuan
   - Peningkatan layanan penyediaan hasil inovasi dan rekayasa teknologi
   - Mengkoordinasikan kerjasama internasional dan antarlembaga

c. Pelayanan informasi publik
   - Pengelolaan sarana dalam pelayanan informasi publik melalui e-government.
   - Melaksanakan standar pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
   - Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi pembangunan di sektor pembangunan.
   - Penguatan system informasi basis data yang akurat dan up to date

13. Langkah Operasional Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penerapan system pengendalian internal pemerintah
b. Pendampingan workshop penyusunan laporan keuangan eselon I dalam rangka mendukung WTP
c. Pelaksanaan audit Barang Milik Negara (BMN)
d. Pelaksanaan review laporan keuangan

C. Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 11 program pembangunan pertanian yang terdiri dari 10 program fungsi ekonomi dan 1 program fungsi pendidikan. Program pembangunan pertanian meliputi:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN

   Sasaran program: Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kementan serta terkoordinasinya pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN

   Sasaran program: Terselenggaranya Pengawasan Internal untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian

3. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN

   Sasaran program: Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas padi, jagung, kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya

4. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA

   Sasaran program: Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas cabai, bawang merah, jeruk dan komoditas hortikultura lainnya

5. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

   Sasaran program: Meningkatnya Produksi dan daya saing Komoditas tebu dan komoditas Perkebunan lainnya

6. PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT

   Sasaran program: Meningkatnya produksi dan daya saing pangan asal hewan dan kesejahteraan peternak

7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

   Sasaran program: Meningkatnya luas pertanaman serta berkembangnya prasarana dan sarana pertanian lainnya

8. PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIO-INDUSTRI BERKELANJUTAN

Sasaran program: Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian

9. PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERTANIAN
   Sasaran program: Meningkatnya Kemandirian dan Kapasitas Petani dan Kelembagaannya serta Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pertanian
10. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
    Sasaran program: Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
11. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI
    Sasaran program: Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta kualitas pelayanan tindakan karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati
12. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTANIAN
    Sasaran program: Meningkatnya kapasitas generasi muda di bidang pertanian

D. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian tahun 2015-2019, diperlukan dukungan regulasi dalam rangka menfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara khususnya di bidang pertanian. Untuk itu diperlukan kerangka regulasi sebagai perencanaan pembentukan regulasi.

Regulasi yang terkait dengan sektor pertanian, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, maupun dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian serta produk peraturan operasional lainnya di level pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kerangka regulasi yang telah ada atau yang dibutuhkan, dikelompokkan mulai dari kebutuhan regulasi terkait input pertanian seperti pemanfaatan sumberdaya genetik, jaminan ketersediaan pupuk dan benih, dukungan infrastruktur, serta regulasi yang terkait lahan dan alsintan. Sedangkan regulasi yang terkait dengan kegiatan budidaya tentunya yang terkait dengan jaminan usahatani tanaman pangan,

hortikultura, peternakan, perkebunan, perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk yang terkait dengan pascapanen, pengolahan dan pemasaran, dibutuhkan regulasi yang mengatur tatacara pascapanen yang baik untuk berbagai produk pertanian, regulasi yang mendorong berkembangnya bioindustri dan pengolahan hasil. Selain itu diperlukan peraturan yang terkait dengan harga, baik itu harga pembelian pemerintah, bea masuk dan bea keluar, serta regulasi lainnya yang mengatur sistem pemasaran yang sehat.

Sedangkan regulasi yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan diperlukan dalam rangka melindungi konsumen serta mendorong produsen menghasilkan produk bermutu. Selain itu juga diperlukan regulasi yang mampu mendorong pertanian memperoleh nilai tambah dari jasa lingkungan seperti agrowisata.

Dalam upaya mewujudkan pencetakan lahan pertanian baru di luar jawa seluas 1 juta hektar serta rencana pendistribusian lahan 9 juta hektar, maka dukungan regulasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya sangat diperlukan.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluh, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perkarantinaan, maka perlu dilakukan review terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluh yang lebih baik. Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan pertanian ke depan diantaranya sebagai berikut:

1. Regulasi di bidang lahan: mempercepat penerbitan Perda Provinsi/ Kab/Kota dan penyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009.
2. Regulasi sarana pertanian: perbaikan subsidi pupuk dan subsidi benih; pengembangan sistem perbenihan.
3. Regulasi pembiayaan pertanian: mempercepat dan mempermudah persyaratan akses petani pada skim kredit.
4. Regulasi perlindungan petani: implementasi UU 19/2013 asuransi usahatani
5. Regulasi terkait penganekaragaman pangan dan gizi
6. Regulasi di bidang ekspor pertanian dan impor produk pertanian:
7. Regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian

Secara lengkap kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan pertanian seperti ditampilkan pada Lampiran Matrik Kerangka Regulasi.

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Pemerintah telah melakukan penataan organisasi Kementerian Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Pertanian, dan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di pusat, UPT sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif.

Kementerian Pertanian telah memiliki sepuluh jabatan fungsional terdiri atas (1) Penyuluh Pertanian; (2) Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan; (3) Pengawas Benih Tanaman; (4) Pengawas Bibit Ternak; (5) Medik Veteriner; (6) Paramedik Veteriner; (7) Pengawas Mutu Pakan; (8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian; (9) Analis Pasar Hasil Pertanian; dan (10) Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan saat ini masih dalam proses penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

Disamping itu, Kementerian Pertanian juga menggunakan 24 (dua puluh empat) jabatan fungsional non rumpun ilmu hayat, terdiri atas: (1) Peneliti; (2) Teknisi Litkayasa; (3) Perekayasa; (4) Pengawas Sekolah; (5) Guru; (6) Dosen; (7) Widyaiswara; (8) Auditor; (9) Instruktur; (10) Pustakawan; (11) Pranata Komputer; (12) Statistisi; (13) Arsiparis; (14) Analis Kepegawaian; (15) Perencana; (16) Perancang Peraturan Perundang-Undangan; (17) Pranata Humas; (18) Dokter; (19) Dokter Gigi; (20) Perawat; (21) Perawat

Gigi; (22) Pranata Lab Kes; (23) Pranata Lab Pendidikan; dan (24) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Ketahanan Pangan sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan pangan nasional diamanatkan sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Secara hirarki di daerah, Kementerian Pertanian memiliki 160 (seratus enam puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan organisasi mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kebijakan strategis dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan organisasi eselon I dan dilaksanakan setelah penataan kelembagaan pusat telah selesai.

Dalam tata hubungan kerja pusat – daerah, penyelenggaraan pembangunan pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab pembangunan pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota.

Tabel Kebutuhan Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian
Tahun 2014-2019

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(orang)					
21.102	21.181	21.272	21.387	21.425	Data e-formasi usulan kebutuhan pegawai per tahun

Terkait dukungan sumberdaya aparatur sipil negara, Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 20.344 orang (data per tanggal 17 Juli 2014) yang tersebar di 12 (dua belas) unit kerja eselon I baik yang berada pada kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah. Untuk mengantisipasi kekurangan SDM yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, telah dilaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

1. Target Makro

Target makro pembangunan pertanian selama tahun 2015-2019 mencakup pertumbuhan PDB, neraca perdagangan ekspor-impor, investasi, tenaga kerja dan Nilai Tukar Petani

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Selama periode Selama periode 2015-2019, PDB nasional diharapkan tumbuh rata-rata diatas 7 %, sedangkan PDB pertanian (diluar perikanan dan kehutanan) diharapkan tumbuh diatas 3,80 %.

Tabel Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub-sektor Pertanian

Uraian	Pertumbuhan (%)						
	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
PDB Nasional	5,02	8.80	6,60	7,10	7,50	8,00	7,60
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,71	3.90	3,98	3,89	3,79	3,80	3,87
1.1. Tanaman Pangan	0,24	4.79	4,85	3,79	2,99	3,04	3,89
1.2. Tanaman Hortikultura	4,19	2.63	2,68	2,75	2,87	2,72	2,73
1.3. Tanaman Perkebunan	5,83	5.43	4,85	5,15	5,02	4,90	5,07
1.4. Peternakan	5,44	3.62	3,30	3,80	4,35	4,72	3,96
1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,58	2.68	2,17	2,45	2,62	2,69	2,52

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) diperkirakan masih cukup besar. Namun demikian diproyeksikan dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di berbagai

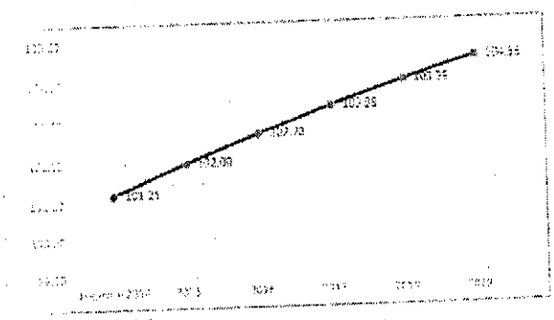
tepat. Neraca perdagangan pertanian selama tahun 2015-2019 diharapkan menunjukkan tren surplus yang terus meningkat.

Tabel Sasaran Neraca Perdagangan Produk Pertanian Tahun 2015-2019

No	SUB SEKTOR	Nilai (juta US$)						Rerata Pertum-buhan (%)
		Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	TANAMAN PANGAN							
	- Ekspor	560	199	219	241	265	292	10,0
	- Impor	6.481	5.993	6.293	6.607	6.938	7.285	5,0
	- Neraca	-5.921	-5.794	-6.074	-6.366	-6.672	-6.993	4,8
2	HORTIKULTURA							
	- Ekspor	752	555	611	672	739	813	10,0
	- Impor	1.929	1.788	1.877	1.971	2.070	2.173	5,0
	- Neraca	-1.176	-1.233	-1.267	-1.300	-1.331	-1.361	2,5
3	PERKEBUNAN							
	- Ekspor	37.123	35.656	39.221	43.143	47.457	52.203	10,0
	- Impor	5.926	2.929	3.075	3.229	3.390	3.560	5,0
	- Neraca	31.197	32.727	36.146	39.914	44.067	48.643	10,4
4	PETERNAKAN							
	- Ekspor	1.330	1.390	1.529	1.682	1.850	2.035	10,0
	- Impor	3.029	3.332	3.498	3.673	3.857	4.050	5,0
	- Neraca	-1.699	-1.942	-1.969	-1.991	-2.007	-2.014	0,9
5	PERTANIAN							
	- Ekspor	39.765	37.800	41.580	45.738	50.312	55.343	10,0
	- Impor	17.365	14.041	14.743	15.481	16.255	17.067	5,0
	- Neraca	22.400	23.759	26.837	30.257	34.057	38.276	12,7

e. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan perbandingan antara indeks yang diterima petani dan indeks pengeluaran petani. Untuk periode 2015-2019, sasaran angka NTP berkisar antar 101,21 hingga 104,56 yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluarannya.



Ket: tahun dasar 2012=100

f. Pendapatan Perkapita

Sebagai sasaran dalam periode 2015-2019, pendapatan perkapita di sektor pertanian:

Tahun	Ribu rupiah	
	PDB Total/Kapita	PDB Pertanian Sempit/ TK Pertanian Sempit
Baseline 2014	34.005,84	10.289,67
2015	36.491,22	10.868,43
2016	38.442,18	11.500,78
2017	40.687,40	12.179,29
2018	43.224,58	12.886,66
2019	46.133,56	13.623,30
Rerata pertumbuhan	6,29%	5,77%

Ket: Berdasarkan harga konstan tahun 2010

2. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019. Target Kinerja Sasaran Kementerian Pertanian seperti berikut:

Target Indikator Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

	INDIKATOR	SATUAN	baseline 2014	baseline 2015	2016	2017	2018	2019	(%/thn)
S.1.1.	**Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula**								
1	produksi padi	juta ton	70,84	74,99	75,13	77,03	80,08	82,07	3,00
2	produksi jagung	juta ton	19,00	19,83	21,35	22,36	23,48	24,70	5,39
3	produksi kedelai	juta ton	0,95	0,98	1,50	1,88	2,34	2,61	23,52
4	produksi tebu	juta ton GKP	2,58	2,62	2,80	2,95	3,30	3,80	8,17
5	produksi Daging Sapi dan Kerbau	ribu ton karkas	533	555,6	589	640	695	755,2	7,23
6	rasio swasembada beras	%	97,92	99,41	≥ 99,5	≥ 99,5	≥ 99,5	≥ 99,5	
7	rasio swasembada jagung	%	84,92	86,50	≥ 90	≥ 95	≥ 95	≥ 95	
8	rasio swasembada kedelai	%	14,04	15,79	≥ 50	≥ 60	≥ 70	≥ 80	
9	rasio swasembada daging sapi dan kerbau	%	75	72	≥ 75	≥ 80	≥ 83	≥ 85	
10	rasio swasembada gula	%	43,0	42,33	≥ 43	≥ 45	≥ 48	≥ 52	
S.2.2.	**Terjaminnya distribusi pangan**								
11	Produksi padi per kapita wilayah Sumatera	Kg/Tahun	305,90	331,21	324,81	328,24	331,70	335,15	1,90
12	rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa	Kg/Tahun	255,54	264,43	265,71	269,70	273,74	277,81	1,69
13	rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan	Kg/Tahun	322,49	326,96	347,37	349,79	352,21	354,61	1,94
14	rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi	Kg/Tahun	460,89	466,79	476,71	482,55	488,45	494,36	1,41
15	rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara	Kg/Tahun	273,24	292,37	291,47	294,94	298,45	301,97	2,05
16	rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua	Kg/Tahun	59,20	61,65	63,37	63,78	64,19	64,59	1,77
17	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	Rp/kg	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	
S.2.3.	**Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi**								
18	Konsumsi Kalori perkapita	Kkal/kap/hari	1.949	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150	1,98
19	Konsumsi pangan hewani perkapita	Kkal/kap/hari	183	191	200	208	217	225	4,22
20	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH	81,8	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	2,5
21	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	%/thn	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
S.3.4.	**Meningkatnya konsumsi pangan lokal**								
22	rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras	%	4,06	5,69	7,44	9,08	10,86	12,54	
S.4.5.	**Stabilnya produksi cabe dan bawang merah**								
23	Produksi cabai besar	ribu ton	1.041	1.082	1.209	1.246	1.283	1.322	4,95
24	Produksi cabai rawit	ribu ton	735	751	890	917	944	973	5,95
25	Produks Bawang Merah	ribu ton	1.061	1.125	1.291	1.330	1.370	1.411	5,96
26	koefisien variasi produksi cabe besar	cv %	13	≤ 13	≤ 12	≤ 11	≤ 10	≤ 10	
27	koefisien variasi produksi cabe rawit	cv %	18	≤ 18	≤ 17	≤ 16	≤ 15	≤ 15	
28	koefisien variasi produksi bawang merah	cv %	26	≤ 20	≤ 18	≤ 17	≤ 16	≤ 15	
29	Koefisien variasi harga produk cabe	cv %	30	≤ 29	≤ 28	≤ 27	≤ 26	≤ 25	
30	Koefisien variasi harga produk bawang merah	cv %	20	≤ 19	≤ 18	≤ 17	≤ 16	≤ 15	
S.5.6.	**Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing**								
31	produksi mangga	ribu ton	2.236	2.285	2.340	2.399	2.460	2.519	2,41
32	produksi nenas	ribu ton	1.851	1.888	1.926	1.964	2.003	2.042	1,98
33	produksi manggis	ribu ton	142	144	147	150	152	155	1,77
34	produksi salak	ribu ton	1.028	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	2,20
35	produksi kentang	ribu ton	1.296	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,00
36	produksi jeruk siam/keprok	ribu ton	1.587	1.640	2.005	2.050	2.100	2.152	6,55
37	produksi karet	karet kering ribu ton	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,86
38	produksi kopi	kopi berasan ribu ton	685	725	738	751	765	778	2,59
39	produksi kakao	biji kering ribu ton	709	773	831	872	916	961	6,28
40	produksi lada	lada kering ribu ton	92	93	94	95	96	97	1,06
41	produksi pala	biji kering ribu ton	26	28	29	30	32	33	4,90
42	produksi cengkeh	ribu ton	111	113	115	117	119	121	1,74
43	produksi kelapa	ribu ton	3.031	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	2,91
44	produksi teh	ribu ton	144	160	160	161	162	163	2,59
45	Produksi susu	ribu ton	801	800	851	911	981	1.064	5,88
46	Produksi daging kambing dan domba	ribu ton	109	115	117	120	122	125	2,79
47	Produksi daging babi	ribu ton	302	335	355	376	398	422	6,90
48	Rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis	%	80,3	80,6	81,1	80,6	80,9	80,6	
49	Penurunan volume impor produk pertanian strategis	%/thn	4,3	-4,9	-9,2	-18,9	-9,5	-2,9	

No.	K/L	DUKUNGAN
		Mendorong penerbitan Perda menindak lanjuti UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 4 PP turunannya
		Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah pengembangan potensi desa di sektor pertanian dan industri di pedesaan berbahan baku hasil pertanian.
3	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Revitalisasi infrastruktur jaringan jalan produksi , irigasi primer dan sekunder di wilayah sentra produksi
		Revitalisasi kelembagaan pengelola air/mantri air, waduk dan embung besar di daerah rawan air
4	Kementerian Perindustrian	Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian
		Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok tani tanaman pangan, horikultura, peternakan dan perkebunan
		Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis kawasan pertanian
		Mendorong revitalisasi pabrik gula, revitalisasi penggilingan padi, serta penguatan industri pakan
5	Kementerian Perdagangan	Penetapan harga dan kelancaran distribusi beras, jagung dan kedelai
		Pengaturan importasi sapi bakalan dan daging
		Kebijakan penataan kerjasama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor
		Pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor untuk mendukung peningkatan harga produk segar dan olahan yang berorientasi ekspor
		Perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu dihasilkan masyarakat petani
		Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi gudang sebagai sarana stok manajemen
		Penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual produk di tingkat usahatani.
6	Kementerian Perhubungan	Adanya ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional
		Perbaikan moda transportasi dan distribusi ternak berupa kereta, kapal dan prasarana pelabuhan.
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Menjadikan sentra komoditas pertanian utama sebagai basis pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan

No.	K/L	DUKUNGAN
8	Kementerian Koperasi dan UMKM	Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan usahatani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi pertanian
9	Kementerian BUMN	Dukungan bagi pengembangan sentra produksi oleh BUMN
		Pembinaan terhadap BUMN produsen pupuk dan benih menjadi lebih profesional dan efisien
		Revitalisasi Pabrik Gula
10	Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan kebijakan konservasi hutan lindung dan DAS untuk menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan dan air pertanian
		Peningkatan produksi komoditas pertanian melalui tumpangsari (terutama kedelai dan tebu) di Hutan Produksi Konversi dan hutan kemasyarakatan
		Pemeliharaan plasma nutfah pertanian in-situ
		Rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan serta kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk perluasan areal pertanian
		Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pemanfaatan pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak
11	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Kebijakan mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
		Penetapan status penguasaan lahan serta perwujudan dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan
		Dukungan perluasan lahan bagi pengembangan kawasan pertanian dan redistribusi lahan terlantar
		Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak
12	Kementerian Keuangan	Penyediaan dana untuk tenaga lapangan; penyuluh pertanian; pengawas benih; petugas karantina pertanian dan tenaga fungsional lainnya.
		Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian (Skim Khusus Pembiayaan Pertanian)
		Keterpaduan pemeriksaan produk pertanian di Bandara dan Pelabuhan (Bea Cukai dan Karantina Pertanian)
		Mendorong dan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal yang tepat.
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kebijakan untuk pelestarian sumberdaya air darat (danau dan situ) untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan usaha budidaya perikanan
		Pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari/mina padi dan perlindungan tanaman melalui pengendalian musuh alami oleh ikan
14	Kementerian	Kebijakan makro arah pengembangan energi

No.	K/L	DUKUNGAN
	Energi dan Sumber Daya Mineral	terbarukan
		Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian
15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan
		Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian
16	Kementerian Agama	Kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama
17	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	Kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri
		Pembinan SMK pertanian menjadi sekolah unggulan pencetak tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan budidaya pertanian
		Pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal
18	Kementerian Fistek dan Pendidikan Tinggi	Pengembangan konsorsium penelitian agro-nanoteknologi untuk meningkatkan produktivitas dan varietas unggul tanaman dan ternak
		Mengikutsertakan unsur-unsur dalam Perguruan Tinggi dalam pendampingan kelompok petani
19	Kementerian Kesehatan	Kebijakan membina dan melindungi petani/peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis
		Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan serta pengawasan produk pertanian yang tidak halal
20	Kementerian PAN dan RB	Penambahan tenaga lapangan POPT-PHP, Penyuluh Pertanian, medis dan paramedis kesehatan hewan, Pengawas Benih dan petugas Karantina Pertanian
21	Kementerian Pariwisata	Mendorong dan membina agrowisata dan industri kreatif berbahan baku pertanian
22	Kementerian Pertahanan	Mendampingi dan ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawalan pelaksanaan ketahanan pangan nasional
23	TNI dan Polri	Pengawalan distribusi input pertanian sampai ke tingkat lapangan, mendukung pelaksanaan pertanaman di tingkat lapangan.
24	Kemenko Bidang Perekonomian	Kebijakan makro untuk sektor pertanian
		Koordinator lintas kementerian/lembaga mendukung ketahanan pangan nasional
25	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk pertanian
26	Perum Bulog	Kebijakan yang mendorong stabilisasi harga

No.	K/L	DUKUNGAN
		komoditas pangan strategis
		Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.
		Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditi strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga stablitas harga
		Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa
27	Perbankan	Pengembangan yang lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian
		Merumuskan skim pmbiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian
		Kebijakan perbankan yang lebih propertanian
28	Perguruan Tinggi	Pengembangan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian pedesaan
		Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian.

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani menjadi visi bersama bagi seluruh elemen di Kementerian Pertanian khususnya, serta pemangku kepentingan di bidang pertanian secara umum. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

AMRAN SULAIMAN